

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Sebaran Data/ Subjek Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kota Makassar

Makassar adalah kota pesisir dan sekaligus kota perdagangan yang merupakan titik penghubung antara Indonesia bagian Timur dan Indonesia bagian Barat. Letaknya sangat strategis karena terletak di 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut, hampir tepat berada di tengah-tengah wilayah negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang membangun sebuah kawasan yang diberi nama *Center Point Of Indonesia* (CPI).



Gambar 4.1.1 Peta Letak Makassar di Indonesia

Sumber: worldatlas.com

Dengan posisi yang strategis seperti ini Kota Makassar menjadi pusat perdangan dan jalur lalu lintas barang di Indonesia. Dengan peran seperti ini maka kestabilan kondisi di Kota Makassar akan mempengaruhi seluruh kondisi di Indonesia, begitu pula sebaliknya jika terjadi bencana

sosial seperti konflik yang berkepanjangan maka akan berdampak ke seluruh wilayah di Indonesia

4.1.2 Demografi Kota Makassar

Makassar memang berasal dari nama salah satu etnis di Sulawesi Selatan, namun saat ini kesadaran masyarakat terhadap nama ini lebih kepada Makassar sebagai wadah berkumpulnya beragam etnis dan penduduk dari seluruh Indonesia itulah kenapa Kota Makassar termasuk kota yang multi etnis. Tercatat kota Makassar memiliki penduduk sebanyak 1.338.663 jiwa. Mayoritas masyarakat tergolong penduduk perkotaan dan hanya sedikit masih di kategorisasikan daerah pedesaan. (sp2010.bps.go.id, di akses pada tanggal 20 Februari 2018). Etnis mayoritas di Kota Makassar adalah Suku Makassar dan Suku Bugis, suku lain yang juga banyak mendiami ionghoa, kota Makassar adalah Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa, dan Sebagainya.

Kota Makassar sebagai pusat pemerintahan provinsi menjadi pusat bagi segala aktivitas masyarakat, swasta, dan pemerintahan, serta pusat untuk kegiatan pendidikan tinggi. Oleh karena itu Kota Makassar menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dari seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya. Tercatat ada 24 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare-Pare, dan Kota Palopo

4.2 Analisis Data

4.2.1 Manifestasi Kebudayaan Kolektivisme dalam Budaya Masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar

Budaya atau kultur juga harus menjadi faktor khusus yang harus di analisa untuk memahami fenomena konflik identitas kelompok secara lebih komprehensif agar dapat merumuskan strategi intervensi yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi konflik identitas di Kota Makassar. pada bagian ini penulis mencoba memaparkan data hasil penelitian yang terkumpulkan terkait manifestasi budaya kolektivisme pada budaya masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Bugis-Makassar.

Menurut Alwy Rachman, sejarah Sulawesi Selatan memang sejarah kolektif. Kekolektifan itu dinyatakan dalam berbagai lambang-lambang identitas seperti etnik, agama, dan lain sebagainya (Wawancara pada 24 Januari 2018). Lebih lanjut dia menjelaskan mengenai kolektivisme itu seperti apa.

Kolektivisme itu kan soal pengalaman hidup bersama, jadi kita terbiasa berkumpul bersama punya pengalaman bersama, punya cita-cita bersama, kita disebut kebudayaan. Itu yang disebut kebudayaan kolektif. Jadi kebudayaan kolektif itu tidak di cari di aspirasi-aspirasi individu tapi di aspirasi-aspirasi kelompoknya. Dimana tempatnya? Biasanya ada pada karya-karya sastra, ada pada cerita rakyat, ada perbincangan, ada pada diskusi, petakapetiki. Jadi cara meneliti apa namanya dream seseorang atau dream suatu kaum demekian juga hasratnya itu pada karya-karya sastranya karena disitu tersimpan. Misalnya orang bugis itu selalu mnengikatkan dirinya dengan suatu karya besar laga-ligo. Jadi kalau menurut saya soal kolektivitas itu soal ingatan. Nah ingatan itu berkaitan dengan hal-hal yang simbolik dan kalau dia simbolik dia pasti identitas. Jadi hampir seluruh identitas itu sifatnya simbolik. Agama, bahasa, etnik, bendera pasti begitu. Jadi konflik identitas adalah sebenarnya konflik simbol.

Masyarakat Bugis-Makassar membangun esprit de corps dan identitas kolektifnya melalui sistem nilai seperti *Mali siparappe* (hanyut saling menyelamatkan), *Rebba sipatokkong* (tumbang saling menegakkan), *Malelu Sipakainge* (terlupa saling mengingatkan), *taro ada taro gau* (berjanji sama menunaikan), *fada idi fada elo* (jalin tekad dalam kebersamaan) (Ali Sahab dan Fahrul Muzaqqi, 2011). tudang sipulung, persaudaraan,

masussureng, siri' ku tu siri' nu to. (Nazaruddin Salam, wawancara pada tanggal 15 Desember 2017), Silessureng yang maknanya menganggap diri bersaudara seibu kandung, kalau persaudaraannya tinggi berarti "sirenrengperru": saling membantu. Kalau kamu lapar, kita sama-sama lapar. Kalau saya makan, kita makan bersama. Jangan kamu lapar, kami kenyang. (Muhammad Tahir, disampaikan pada pull & push factor SAT tanggal 6 Februari 2018) Banyak disini filosofi-filosofi yang menggambarkan kuatnya kekolektifitasan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar.

Alwy Rachman (Wawancara pada 24 Januari 2018). juga menjelaskan lebih lanjut mengenai karakteristik dari masyarakat kolektif sebagai berikut:

Kolektivisme biasanya ada patron, ada bapak dalam suatu kaum itu yang menghimpun semua kegiatan-kegiatan kolektif, jadi kalau saya punya acara, cukup saya panggil orang tersebut. Kolektivisme itu diikat oleh nilai-nilai yang sama. Asalnya masyarakat Sulsel begitu. Timur itu kolektivisme, barat individualisme. Makanya ketika isu yang simbolik langsung kolektif bergerak. Di Inggris kalau kita berucap pada Yesus orang tidak apa kok, tapi kalau di sini kolektifnya keluar. Iya merasa terhina secara bersama-sama.

Di Sulawesi Selatan misalnya, di beberapa daerah terdapat tokoh-tokoh wisdom, misalnya orang-orang bijak, ulama, pastor, kyai yang dituakan dan hidup dalam suatu kultur yang berdasarkan tradisi-tradisinya. Kolektivisme sangat erat kaitannya dengan faktor kepemimpinan dalam kehidupan bersama, karena kalau dia kolektif dia harus bersama (Alwy Rachman, Wawancara pada 24 Januari 2018).

Karakter khas dari budaya Bugis-Makassar lainnya adalah dalam budaya *Siri'* yang artinya adalah "malu". Ali Sahab dan Fahrul Muzaqqi (2011) dalam tulisannya menjabarkan lebih mengenai *Siri'*, yaitu sebagai berikut:

Masyarakat Bugis mempunyai ajaran atau falsafah hidup untuk lebih baik atau memosisikan diri lebih di atas terhadap sesamanya (masyarakat lain) melalui konsep *Siri'*. *'Siri'* merupakan konsep keperibadian yang menjadi falsafah hidup masyarakat Bugis. *Siri'* na pesse dijadikan hukum kehidupan. Jika seseorang tidak lagi

memiliki siri' maka dapat dinilai individu itu tidak lagi memiliki kepribadian dan bermakna mati dalam aspek psikologis. Seperti yang terdapat dalam ungkapan "siri' mi tu narituo" (karena malu kita hidup). Malu menjadi miskin, malu menjadi seorang yang tidak taat pada sara' (aturan agama). "Masiri' tuo mappale" (malu hidup menadahkan tangan) menjadi falsafah hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis. Singkatnya, siri' merupakan sebuah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia atau rasa dendam dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerangka kemuliaan dan pemulihan harga diri yang disesuaikan dengan norma-norma atau aturan adat dan sara' (hukum Islam) yang berlaku.

Budaya Siri' ini sangat mengakar dalam diri masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar. Menurut Syamsu Rizal, Siri na pacce pada prinsipnya adalah berani menegakkan aturan dan malu kalau tidak memberikan kontribusi atau manfaat ke orang lain. Itu hakikinya siri na pacce (wawancara pada 1 Februari 2018). Namun penjabaran falsafah *siri'* pada kenyataannya sudah mengalami degradasi. Sehingga sering kali *siri'* dimaknai sebagai upaya balas dendam jika terdapat pihak tertentu yang dirasakan menyinggung perasaan. Aksi seperti ini bisa saja disebut sebagai bentuk perwujudan rasa siri' namun sayangnya tidak jarang rasa *siri'* itu juga dipicu oleh pihak lain yang "*de' ga sirina*" (tidak memiliki rasa malu). Jika seseorang memiliki sesuatu niat atau tujuan yang tidak baik, maka dalam konteks *siri'*, orang tersebut sebenarnya sudah mati atau tetap hidup namun "*tuo fappadai olo' kolo'e*" (hidup sama dengan binatang).

Mahasiswa memahami Siri' dengan cara yang sederhana, dan dan tidak komprehensif. Nazaruddin (wawancara pada tanggal 15 Desember 2017) Salam menjelaskan bagaimana pemahaman Mahasiswa yang berkonflik ini terkait Siri' ini.

.... Dipermalukan, orang sini bilang masalah siri'. Jadi boleh itu masalah kasus besar atau kecil tidak menjadi persoalan, tapi kalau menyinggu di paka siri' maka akan muncul masalahnya. Dipermalukan kita masa junior kita dipukul, masa junior kita lewat tiba-tiba diganggu, malu kita sebagai senior tidak membela dia. Padahal junior ini dia terima ji diteriaki namanya juga anak baru toh. Tapi si senior berpikir nateriaki ko disana? Bikin malu itu! E.. sudah itu kata malu, kata siri' di situ. Sama itu ndak ada malumu itu di pukul temanmu kau hanya diam-diam? Kata malu lagi muncul

disitu sehingga disini cepat sekali panas karena kalo munculmi kata itu, weh ndak malu ko itu? Nah itu bedanya dengan daerah lain. Kalau daerah lain, weh ndak maluko itu itu? Maluka iya tapi bukan urusanku itu. Iya kan, akhirnya ter protect ah biar dia urus, ah kondisi ini pasti urusannya kalo dipermalukan mi temannya, dan dia akan tinggalkanmi yang lain, inilah yang kemudian jadimi konflik yang besar.

Pemahaman dalam memaknai Siri' seperti inilah yang dianggap keliru oleh Alwy Rachman (wawancara pada tanggal 24 Januari 2018) dalam penjelasannya sebagai berikut:

Saya kira siri itu soal lain loh. siri itu soal permasalahan lain in soal tatanan besar itu. Siri itu menyangkut institusi loh. Soal pengaderan, pengadakkang orang Makassar bilang. Siri itu di masa lalu diwadahi oleh beberapa institusi tradisional dulu, tidak seperti sekarang orang numpang dari kata siri' ini. Hal itu terjadi karena salah persepsi orang yang tidak belajar sejarah itu. Tidak seperti yang dipahami oleh umum. Apa yang ada di media itu sebenarnya terlalu ringan. Kayak orang nonton uang panaik, padahal tidak begitu

Alwy Rachman memberikan pendapatnya mengenai contoh pemaknaan dan penerapan Siri' yang benar (Wawancara pada 24 Januari 2018):

Misalnya dulu Siri semangatnya ada di lima institusi. Misalnya institusi Sara' misalnya, ada Raja dia bilang begini itu dibawa ke rapat dewan adat. Dewan adat tolak, tolak perkataan raja. Itu soal siri'. Ada orang silariang dikejar tapi kalau dia sudah masuk rumah imam ndak bisa lagi apa-apa. Anda tidak bisa lagi ganggu kalo sudah masuk halaman orang itu siri' karena kalo kau masih buru orang kawin lari ini di rumah Imam. Imam akan bilang kau melanggar hak saya, dia sudah di bawa perlindungan saya lho. Itu siri'. Banyak orang salah paham tentang itu.

Dari berbagai pembahasan diatas mengenai hubungan antara budaya kolektivisme dengan budaya Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar, memiliki kecocokan yang sangat kuat. Dari hal inilah kita dapat menyimpulkan bahwa budaya masyarakat Kota Makassar terkandung di dalamnya nilai-nilai dari budaya kolektivisme.

4.2.2 Latar Belakang Konflik Kekerasan Antar Kelompok Mahasiswa di Kota Makassar

Untuk lebih memahami konflik kekerasan antar kelompok mahasiswa di Kota Makassar ini akan dipaparkan data-data yang menunjukkan pola, bentuk, dan narasi latar belakang konflik kekerasan antar kelompok mahasiswa di kota Makassar berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengumpulan data penelitian yang telah dilakukan.

4.2.2.1 Analisis *Push & Pull Factor*

Berikut ini adalah hasil pengumpulan dan analisis data mengenai *push & pull factor* terjadinya konflik kekerasan antar kelompok Mahasiswa di Kota Makassar.

Tabel 4.1 Analisis Push and Pull Konflik Kekerasan antar Kelompok Mahasiswa di Kota Makassar

Push Factor	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memori Kolektif Masa Lalu, dendam lama, dan konflik yang dianggap belum selesai 2) Momentum awal masuknya mahasiswa baru 3) Ideologi ingroup yang berdampak pada solidaritas negatif 4) Faktor Populasi 5) Lepasnya kendali sosial terhadap individu 6) Pemaknaan budaya yang keliru dan menyebabkan hilangnya nilai-nilai persaudaraan 7) Ketidakadilan dalam kebijakan-kebijakan kampus 8) belum ada design komperhensif pelayanan akademik terkait konflik kekerasan antar kelompok 9) Faktor Ketimpangan Ekonomi 10) Faktor momentum Pemilihan Kepala Daerah dan atau Pemilihan Pimpinan Kampus
--------------------	---

Pull Factor	<ol style="list-style-type: none"> 1) Keinginan untuk mengiksistensikan lembaga, oraganisasi, atau komunitas 2) Ketertarikan atas perasaan maskulinitan atau kebanggaan 3) Keinginan untuk melindungi diri dari ancaman atau mencari keamanan dalam kelompok 4) Keinginan untuk menjaga atau melindungi wilayahnya
--------------------	--

Sumber: Wawancara dan kegiatan PAR di olah oleh penulis

a. Push Factor

Faktor pertama yang menjadi pendorong dalam fenomena konflik kekerasan antar kelompok di Kota Makassar yaitu terkait faktor memori kolektif masa lalu, dendam lama, dan konflik yang dianggap belum selesai. Dalam membahas konflik kekerasan antar kelompok di kota Makassar, tidak dapat kita lepaskan dari tinjauan sejarah masa lalu masyarakat yang terjadi di daerah tersebut. Berdsarkan dari perspektif sejarahnya, Ali Sahab dan Fahrul Muzaqqi (2011) memaparkan faktor sosio-historis yang dapat menjadi tinjauan dalam memahami fenomena ini

Di Makassar terdapat setidaknya dua kerajaan besar pada zaman dahulu, yaitu kerajaan Bone dan kerajaan Goa (Makassar). Pada masa lalu dua kerajaan ini terlibat konflik, konflik dua kerajaan ini selalu direproduksi oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Kekerasan mahasiswa merupakan reproduksi dari sejarah dan nilai-nilai budaya maskulin yang kental dengan nuansa kekerasan. Mahasiswa mewarisi sejarah dan nilai-nilai budaya yang saling menguatkan etnosentrisme. Suku yang satu merasa lebih superior dengan suku yang lain karena mereka memandang atau berorientasi pada masa lalu. Akibatnya kekerasan dan vandalisme merupakan sesuatu hal yang biasa karena sudah terinternalisasi dalam diri mahasiswa Makassar.

Peperangan antar kerajaan ini tidak hanya terjadi antara kerajaan Bone dan Goa (Makassar) tapi juga dengan kerajaan Luwu yang merupakan kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Misalnya pada masa pemerintahan Raja Bone V, Latenri Sukki terjadi perang dengan kerajaan

Luwu yang disebut dengan perang *Cellu*. Pada masa pemerintahan La-Uliyo Bote'E, yang merupakan penerus dari Raja Bone Latenri Sukki, terjadi lagi peperangan dengan Kerajaan Luwu, dengan bantuan dari kerajaan Gowa. (Abdullah, Anzar, 2017, p.19)

Pengaruh memori kolektif masa lalu ini di kuatkan oleh apa yang disampaikan oleh Alwy Rachman (Wawancara pada 24 Januari 2018) yang menyatakan bahwa:

Sejarah perang di masa lalu Bugis Makassar itu membuat suku Bugis makassar itu reaktif dan mawas, karena peperangannya panjang sekali sebenarnya itu satu. Yang kedua seluruh institusi resolusi konflik ala masa lalu itu sudah tidak ada, itu dimanipulasi oleh Belanda lalu masuklah peraturan-peraturan sekarang. Jadi institusinya belum dipersiapkan baik gitu. Jadi ada problem kebudayaan.

Memori kolektif masa lalu berupa cerita-cerita heroisme peperangan masa lalu dan secara turun temurun diturunkan ataupun konflik-konflik yang dianggap belum selesai, kemudian menjadi dendam, dan menjadi bibit kebencian. di Sulsel itu di masa lalunya penuh dengan peperangan, penuh dengan konflik yang akhirnya membuat kita menjadi terlambat di dalamnya (Alwy Rachman, disampaikan pada sesi SAT PAR tanggal 6 Februari 2018)

Di lingkup kampus, juga terdapat peristiwa-peristiwa yang menjadi memori kolektif dimana memori ini selalu menjadi bibit terjadinya konflik. Sebagaimana disampaikan oleh Nazaruddin Salam (wawancara pada tanggal 15 Desember 2017):

yang berkonflik itu sebenarnya sudah ada benih yang tertanam jauh sehingga dengan sedikit saja kepentingan orang untuk meledakkan itu dengan mudah meledak. Contoh, Teknik kita dikampus dulu, kan tidak pernah konflik horisontal Teknik dengan kedokteran karena dipancing bagaimanapun pasti tidak akan terjadi. Tapi kalau di pancing dengan sospol, ekonomi, atau satra pasti terjadi, karena ada sejarah yang pernah ada bibit itu. Sama misalnya ada satu daerah di Sulawesi Selatan, begitu daerah itu bersentuhan langsung besar karena ada bibit yang tertanam. Kalau dari sana kita punya lawan begitu pula sebaliknya sehingga kedua daerah ini selalu bersinggungan. Sama juga di Jakarta misalnya

antar SMA itu, itu-itu teruskan, atau daerah disitu terus konflik-konflik, karena ada yang tertanam

Di dalam kasus Universitas Hasanuddin (Unhas), pada saat Unhas masih berpusat di Barayya (Kampus lama Unhas) di era 70-an dan 80-an konflik kekerasan antar Fakultas belum terjadi, kecenderungan saat itu persoalan individu yang terjadi diselesaikan secara pribadi tidak secara kelompok. Sekarang terjadi pergeseran bagaimana ketegangan atau konflik itu di selesaikan. Belakangan ini kadang ada orang yang penting kelompoknya terganggu, dia tidak telusuri lebih jauh yang bersangkutan benar atau salah pokonya terganggu kelompoknya, dia langsung membantu. Nah itu yang saya lihat yang bergeser sehingga konflik jadi besar, harusnya konflik itu tidak perlu besar. (Nazaruddin Salam, wawancara pada tanggal 15 Desember 2017)

konflik antar kelompok mahasiswa mulai terjadi di awal tahun 90-an setelah Unhas pindah ke Tamalanrea. Sebagaimana di jelaskan oleh Nazaruddin Salam (wawancara pada tanggal 15 Desember 2017)

Fenomena konflik kekerasan antar kelompok baru terjadi pada tahun 90-an setelah Unhas pindah ke Tamalanrea. Nanti pindah ke Tamalanrea baru ada tawuran. Dulu di Baraya itu bukan tidak ada kekerasan, misalnya kalau kita demo kan keras, ada juga pernah kita pernah di serang oleh aparat, tapi kalau perkelahian antar Fakultas tidak pernah ada, ada perkelahian antar daerah tapi bukan di dalam kampus terjadi di luar kampus, bahwa ada mahasiswa terlibat ada, tapi tidak pernah terjadi di dalam kampus. Disini kadang ada persetujuan antar daerah membonceng di antar Fakultas. Tapi kemudian tidak kelihatan antar daerahnya, yang kelihatan antar fakultasnya

Gambaran dinamika konflik kekerasan antar kelompok mahasiswa di Unhas, disampaikan oleh Abdul Rasyid (Wawancara pada tanggal 23 Januari 2018) sebagai berikut

Kalau seingat saya memang, yah seperti yang saya sampaikan terkait konflik. Itu sudah ada sejak dulu sebenarnya, cuma tingkat presentasinya ada yang mengalami peningkatan ada yang mengalami penurunan sebagai contoh misalnya di kampus Unhas yang alhamdulillah adalah proses positif yang kemudian presentasinya mengalami penurunan yang sangat luar biasa

Contoh momentum signifikan yang membuat menguatnya konflik kekerasan antar kelompok di Unhas yang kemudian selalu menjadi benih, memori konflik masa lalu adalah peristiwa yang sering disebut dengan “*Black September*”. (Marjian, Kacung & Fitrianto, Hari, 2013, p.17). Momentum ini adalah dimana terjadi tawuran mahasiswa antara kelompok mahasiswa Fakultas Teknik melawan Fakultas Sosial dan Politik (Sospol) yang dibantu oleh Fakultas non eksak lainnya. Pada peristiwa ini, salah satu gedung Fakultas Teknik dibakar dan empat mahasiswa dipenjarakan selama dua tahun. Peristiwa *Black September* menjadi titik naiknya intensitas konflik kekerasan antar kelompok di Universitas Hasanuddin.

Di kampus Unismuh pun juga seperti itu, ada peristiwa besar yang menjadi memori kolektif antara kedua belah pihak yang menjadi bibit permusuhan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Tahir (wawancara pada tanggal 2 Februari 2018)

.... setelah masuk tahun 2010-an kemudian 2014, 15, 16 itu sampai sekarang. konflik antar Fakultas ini sudah mulai redah tepi tergantikan lagi dengan konflik organisa konflik organisa yg mengatasnamakan etnis ini kalau di Unismuh ini yg besar itu organidanya terutama Bulukumba kemudian Palopo, Bone e Enrekang kemudian apalagi Laskar. Laskar ini terdiri dari Jentago yaitu Jeneponto, Gowa, Takalar. Nah konflik etnis ini juga terkadang karena pernah diawali dulu konflik bersarnya dulu itu antara palopo dengan Bulukumba sampai ada ada pembakaran sekret itu sekret kedua belah pihak itu saling terjadi pembakaran sampai ada itu namanya kontak fisik kemudian terjadi apa namanya ada yg korban busur parang dan seterusnya.

Beberapa peristiwa inilah yang menjadi memori kolektif terhadap konflik-konflik masa lalu dan menjadi bibit kebencian ke kelompok lain. Bibit ini ditanam dan diturunkan melalui cerita-cerita masa lalu, cerita heroisme masa lalu, cerita dendam kepada generasi-generasi berikutnya dalam kampus atau organisasi tersebut. Seringkali hal ini juga menjadi narasi kebencian kepada kelompok lain yang membuat adanya dendam secara tidak sadar dan mengakibatkan seringnya terjadi kegagalan rekonsiliasi. tidak selesainya proses perdamaian antar kelompok yang berkonflik sehingga ketika ada faktor yang mendukung terjadinya konflik, persoalan

yang lama terungkit-ungkit kembali. (Itong Sule, sesi push & pull factor PAR, pada tanggal 6 Februari 2018),

Selain faktor memori masa lalu di atas, faktor momentum atau waktu juga menjadi faktor kedua yang mendorong terjadinya fenomena konflik kekerasan antar kelompok mahasiswa di Kota Makassar. Yang menariknya adalah, Intensitas konflik antar kelompok mahasiswa meningkat di momen-momen tertentu misalnya pada saat momentum masa-masa penerimaan mahasiswa baru, hal ini senada dengan pendapat Abdul Rasyid (Wawancara pada tanggal 23 Januari 2018) yang mengatakan:

Jadi kalau di kampus itu, kalau kita belajar dari sejarah fenomena-fenomena terjadi yang pada umumnya terjadi di bulan-bulan Agustus-September gitu. Kenapa di bulan-bulan itu karena populasi baru yang masuk kedalam kampus tersebut sehingga terkadang populasi baru ini menjadi hal yang menarik yang kemudian kelompok2 mereka resisten untuk e terhadap pihak lain untuk masuk di tengah kelompok

Ideologi ingroup yang berdampak pada solidaritas negatif menjadi faktor push yang ketiga. Menurut Nazaruddin Salam (Wawancara pada tanggal 15 Desember 2017) penyebab tingginya konflik kekerasan antar kelompok karena rasa Solidarity yang kebablasan, solidarity yang tidak mau tahu apa permasalahannya. Kalau ada temannya di serang, maka reaksinya adalah balas serang. Nanti dibelakang baru ketahuan oh ternyata masalahnya sepele. Lebih lanjut beliau menjelaskan:

Kalau di sini tinggi sekali solidaritasnya dengan sesama teman, sehingga sedikit di sentuh temannya, itu tadi kembali lagi tidak mau tau pa masalahnya, pokonya harus membela temannya, daerahku, lokasi ku. Pokoknya kampung sebelah itu lawan kita, mungkin ada yang di tabrak, sudah tawuran, ada yang izin menegur tawuran lagi, karena itu tadi bibit itu. Darimana? Ini mentong patoatoai dari sebelah ini. Kalau kita lihat mendasar itu akarnya karena solidaritas yang tinggi antar identitas fakultasnya kalau di kampus, dan daerahnya kalau itu di luar. Sehingga terjadilah perkelahian antar fakultas, daerah, atau lokasi. Contoh, ambillah di perguruan tinggi lain yang berkampus di parangtambung, itu terus yang terjadi antar

dua kelompok itu saja. Karena begitu mungkin karena hanya masalah perempuan saja digonceng terus di teriaki bisa memicu

Permasalahan solidaritas sebagai penyebab tingginya intensitas konflik kekerasan mahasiswa ini, juga disampaikan oleh Muhammad Tahir (Wawancara pada tanggal 2 Februari 2018) dalam pernyataannya sebagai berikut:

saya pikir identitas itu dengan kondisi psikologi masyarakat Makassar atau masyarakat etnis yg ada Sulsel itu bagi saya itu merupakan satu simbol pertarungan, yah ketika dia sudah menjadi bagian dari e apa namanya kelompok itu misalnya ada organda tertentu organda nya misalnya organda nya itu kalau sudah dia menjadi bagian, apa lagi kalau sudah di kader, di apa namanya di organda itu, lalu kemudian tentu ada doktrin khusus yah. sudah menerima doktrin, itu saya liat solidaritas identitasnya itu semakin sangat tinggi untuk di perjuangkan. Nah malah itu kalau ada anunya saya dengar-dengar kalau di cubit satu maka yang lain harus merasakan sakit. itu tingkat solidaritasnya, yang membuat mereka, tetapi itu pada ranah doktrin tertentu, identitas tertentu tidak di generalis bahwa semua masyarakat Makassar seperti itu yah saya pikir yang pernah menerima doktrin-doktrin tertentu termaksud juga di organda. Itu organda itu, itu doktrinnya memang seperti itu kalau di cubit satu maka yg lainnya harus anu, merasakan sakitnya juga. Sehingga ketika ada individu antara oknum yg terlibat di antara itu maka solidaritasnya itu yang lain harus anu harus membantu, nah sehingga konflik individu itu menjadi identitas kelompok yang keluar bukanmi lagi si A yg keluar lagi dgn B tapi identitasnya, jadi mungkin itu semangat solidaritasnya yang disalah artikan dalam dalam tanda kutip di salah artikan dibawa ke arah pengaruh negatif

Alasan lain yang dipaparkan oleh Abdul Rasyid (Wawancara pada tanggal 23 Januari 2018) adalah rasa kebanggaan yang sangat berlebihan yang mengakibatkan ada kelompok tertentu atau fakultas tertentu yang merasa superior dibandingkan dengan kelompok lain. Hal ini dikuatkan oleh rasa solidaritas yang tinggi namun diarahkan ke perilaku yang negatif.

Tingkat klimaks dari solidaritas yang di arahkan negatif ini adalah ketika satu kelompok menganggap kelompok yang lain sebagai musuh. Solidaritas ini biasanya lahir dan tumbuh karena peran leader dan doktrin pengkaderan dalam aktivitas kekaderannya. (Muhammad Tahir, wawancara pada tanggal 2 Februari 2018).

Bagaimana Solidaritas yang radikal ini dapat menyebabkan sebuah konflik kekerasan antar kelompok mahasiswa di jelaskan oleh Ramadhan (sesi push & pull factor PAR, pada tanggal 6 Februari 2018), yaitu sebagai berikut:

terkait dengan kata solidaritas. Solidaritas sudah menjadi dorongan dan digembor-gemborkan untuk terjadinya konflik. Bagi kami, solidaritas disini telah kehilangan makna, beralih fungsi. Contoh konflik yang diakibatkan solidaritas misalnya, suatu ketika, saya yang menjadi anggota organisasi A punya masalah dengan organisasi B. anggota organisasi B menyanggol saya. Persoalan saya individu, tetapi teman saya dari organisasi A datang membantu saya, tiba2 memukul anggota organisasi B tersebut. Alasannya terdorong dari dalam bahwa ia solid. Solid diartikan ketika teman saya sakit, maka saya harus membalas sakitnya teman saya.

Ramadhan kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai bagaimana solidaritas ini menguat di satu kelompok:

karena doktrin. Entah doktrin karena kejadian tertentu, atau doktrin oleh orang tertentu. Misalnya dalam suatu organisasi, orang yang didengar itu senior-senior teratas. Oleh karena itu, doktrin yang berhasil dari senior teratas. Doktrinnya langsung masuk. Membuat kita merasa nyaman dalam suatu kelompok. Membuat kita merasa harus mengabdikan karena apa yang dikatakan oleh senior adalah yang benar. Seperti halnya doktrin solidaritas. Kalo ada temanmu yang disakiti, kamu harus bantu, karena kalau tidak dibantu, yang cedera bukan hanya temanmu, tetapi lembagamu. Doktrin seperti ini membuat mahasiswa berpikir bahwa, ok, ketika salah satu mendapat masalah, semua merasa bahwa itu masalah kita.

Hal senada tentang bagaimana terbentuknya solidaritas negatif ini, disampaikan oleh Anshar Aminullah (sesi push & pull factor PAR, pada tanggal 6 Februari 2018) sebagai perwakilan yang mempresentasikan hasil diskusi grup kelompok stakeholder, yaitu sebagai berikut

Kemudian ada ideology In Group yang berdampak menghasilkan solidaritas yang berbau negatif. Ideology in grup ini, kalau ia masuk dalam suatu organisasi dihadapkan pada suatu bentuk indoktrinasi. Ada fakta menarik yang tadi diungkapkan oleh wakil rektor bahwa indoktrinasi dilakukan dengan cara mensugesti. Misalnya diambil badik, ditikamkan, apakah kalian merasa sakit

atau tidak?, bila tidak, ditusuk lebih tajam lagi. Apabila belum merasa sakit, maka kau belum menyatu dengan saya.

Faktor keempat adalah faktor populasi, Kalau diperhatikan konflik antar kelompok mahasiswa di Kota Makassar hampir di seluruh universitas, pasti melibatkan Fakultas Teknik sebagai salah satu pelakuknya, terkait menguatnya kategorisasi Fakultas Teknik ini, menarik melihat pendapat Abdul Rasyid (Wawancara, 23 Januari 2018) mengenai faktor populasi, sebagai berikut:

satu faktor adalah populasi jadi misalnya kampus tersebut luas lahannya tidak terlalu besar tapi populasinya cukup tinggi, dengan gesekan-gesekan kecil itu bisa mengakibatkan konflik, pada saat konflik individu bisa mengakibatkan konflik kelompok dengan mengatas namakan kelompok dan sebagainya. Itu salah satu faktor jadi memang populasi ini sangat mempengaruhi. Karna semakin banyak akan menyebabkan kompensasinya juga semakin besar dan itu bisa mengakibatkan konflik

Lebih lanjut pendapat Muhammad Tahir (Sesi Conditioning PAR, 6 Februari 2018) terkait determinan Fakultas Teknik dalam konflik-konflik antar kelompok mahasiswa di Makassar sebagai berikut.

..... Memang ada kita punya anak dari fakultas Teknik yang sering menjadi titik awal kerusuhan atau pergerakan mahasiswa selalu mencari lawan, dan aksi heroik, egoisnya, itu sampai sekarang saya bingung untuk bagaimana mencarikan solusinya. Sampai-sampai kemarin dia sudah tidak punya lagi lawan di dalam (kampus Unismuh) karena sudah hampir semua fakultas sudah bersetuhan (tawuran) dengan mereka, dan karena mengganggu posisinya sedang kuat karena tidak ada lagi yang merespon

Memang biasanya jumlah mahasiswa Fakultas Teknik di seluruh Universitas di Makassar itu, cenderung lebih banyak dan didominasi oleh laki-laki (jumlah mahasiswa laki-lakinya jauh lebih banyak dibandingkan mahasiswa perempuan). Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat kelompok mahasiswa Fakultas Teknik selalu menganggap kelompoknya lebih besar, banyak, dan lebih superior di bandingkan kelompok lain.

Lepasnya kendali sosial terhadap individu, merupakan push factor yang kelima yang berkontribusi dalam tingginya intensitas konflik kekerasan antar kelompok mahasiswa adalah lepasnya kendali atau pengawasan social terhadap individu, Jika kita mininjau aktor-aktor pelaku konflik kekerasan tersebut, mereka mahasiswa yang luar biasa seramnya, luar biasa ekstrimnya. Ada yang bawa papporo, bawa busur dan senjata lainnya. Padahal sampai di kampung mereka rajin ke mesjid, mendengarkan orang tua. Kenapa hal ini dapat terjadi? Di kampung, ada orang tua dan keluarganya yang mengawasi. Sampai di kota lepas kendali, tidak ada yang mengawasi. (Anshar Aminullah, disampaikan di sesi push & pull factor PAR pada tanggal 6 Februari 2018)

Faktor yang keenam adalah terkait pemaknaan budaya yang keliru dan menyebabkan hilangnya nilai-nilai persaudaraan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada kesalah pahaman dalam memaknai budaya Siri' di masyarakat Kota Makassar khususnya di mahasiswa yang sering melakukan konflik kekerasan antar kelompok. Hal ini dijelaskan oleh Itong Sule (di sampaikan di sesi push & pull factor PAR pada tanggal 6 Februari 2018) sebagai berikut

Pemaknaan budaya, kita di Sulawesi Selatan sangat terikat sama faktor-faktor budaya, dan kita masih terjaga baik dari sisi kebudayaan, hanya saja kemudian terjadi pemaknaan-pemaknaan yang tidak dipahami, sehingga mensalah artikan. Seperti pemaknaan kata siri' na pacce. Kalau di bilang siri harus memang di balas, kalau tidak dibalas tidak ada siri'ku, itukan hal-hal yang perlu juga diberikan pemahaman

Pemaknaan keliru tentang siri' inilah yang seringkali menjadi faktor pendorong terjadinya konflik kekerasan antar kelompok yang akhirnya berdampak pada terpinggirkannya budaya-budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Tahir (disampaikan di sesi push & pull factor PAR pada tanggal 6 Februari 2018) sebagai

kaburnya nilai2 persaudaraan atau silessoreng (note: arti harfiahnya 1 tempat keluar). Disampaikan oleh WR3 Unismuh: Nilai persaudaraan hanya ada dalam 1 kelompok yang sama. Dalam filosofi Bugis, ada yang disebut silessoreng yang maknanya

menganggap diri bersaudara seibu/kandung. Ada dua hal yang timbul disitu. Yang pertama, kalau tidak menganggap diri silessureng, berarti malleperru. Artinya kamu adalah kamu. Sipakatuo, sipakatokkong tidak ada disitu. Bahkan tolong menolong juga tidak ada. Nilai yang kedua, kalo persaudaraan tinggi, berarti "sirenrengperru": saling membantu. Kalau kamu lapar, kita sama-sama lapar. Kalau saya makan, kita makan bersama. Jangan kamu lapar, kami kenyang.

Faktor yang ketujuh adalah Ketidakadilan dalam kebijakan-kebijakan kampus. Satu hal yang dianggap menjadi faktor pendorong lahirnya konflik kekerasan antar kelompok adalah ketidakadilan. Beberapa oknum mahasiswa memiliki pandangan kmapus tidak adil misalnya, merasa fakultas lain bagus pelayanannya, kita tidak. Hal-hal seperti ini memicu ketegangan dan terganggunya kedamaian. (Anshar Aminullah, disampaikan di sesi push & pull factor PAR pada tanggal 6 Februari 2018)

Faktor kedelapan adalah belum ada design komperhensif sistem pelayanan akademik terkait konflik kekerasan antar kelompok. Kampus-kampus dirasa luput selama ini dengan tidak adanya pelayanan-pelayanan akademik yang terkait dengan persoalan-persoalan mahasiswa di luar akademik perkuliahannya. Pelayanan akademik hanya berjibaku pada persoalan administrasi, seperti pelayanan pembayaran, perkuliahan dll, tidak pernah masuk pada permasalahan (konflik) yang dihadapi mahasiswa. sejauh ini penyelesaian konflik fokus pada penegakan disiplin dan pengamanan. Permasalahan konflik kekerasan adalah sanksi. Selama ini kampus luput, sehingga tidak mencoba membuat strategi yang bersifat preventif untuk meminimalisir persoalan. Misalnya konflik yang sering terjadi antara mahasiswa dengan masyarakat diatasi hanya dengan pengamanan kepolisian atau sebatas penegakan aturan tata tertib kampus, sehingga kejadian ini terus berulang karena tidak mengintervensi sampai akar-akar masalahnya (Anshar Aminullah dan Akbar, disampaikan di sesi push & pull factor PAR pada tanggal 6 Februari 2018). hal ini dikuatkan oleh argumen Wahyu Hidayat (disampaikan di sesi push & pull factor PAR pada tanggal 6 Februari 2018) yaitu sebagai berikut:

Seperti yang dipresentasikan sebelumnya, banyak mahasiswa yang tidak mau menyampaikan permasalahannya kepada penasehat akademik (PA). itu bila dilihat dari sudut pandang dosen. Dari sudut pandang mahasiswa, PA hanya bertanya tentang nilai akademik, nilai.... Nilai... Kita hanya dituntut dengan nilai. Tidak ada PA yang bertanya, apa kendalamu dalam perkuliahan, atau mengerucut pada masalah apa yang sedang kamu hadapi....

Menarik apa yang disampaikan oleh Alwy Rachman mengenai peran sistem dalam fenomena ini.

Jadi proses blok-blok, kelompok-kelompok mahasiswa itu akibat dari satu sistem. Maaf ya, saya sebagai pribadi yang belajar ilmu pengetahuan, saya ndak percaya ada manusia baik. Manusia baik itu hanya lahir dari sistem yang baik. Sistem yang baik akan mencegah manusia yang paling buruk pun untuk menjadi buruk. Nah, tapi kalau sistemnya buruk, manusia baik juga bisa berantakan, bisa hancur

Faktor kesembilan adalah Ketimpangan Ekonomi, Berdasarkan hasil diskusi kelompok mahasiswa, Itung Sule (disampaikan di sesi push & pull factor PAR pada tanggal 6 Februari 2018) menjelaskan terkait faktor ketimpangan ekonomi ini. Di Kota Makassar terjadi ketimpangan ekonomi, Factor ekonomi ini menyebabkan seseorang melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya, khususnya sandang dan pangan.

Syamsu Rijal Ad'han (sesi conditioning PAR pada tanggal 6 Februari 2018) mengutarakan data penelitian yang dia miliki terkait ketimpangan ekonomi masyarakat kota Makassar dan dampaknya terhadap fenomena konflik kekerasan di Makassar, yaitu sebagai berikut:

kalau terjadi konflik kekerasan dalam masyarakat kita itu kita harus perhatikan khususnya termaksud sulawesi selatan itu berarti ada sebuah proses sosial yang harus kita amati, apa sebabnya hal tersebut bisa muncul. Kesenjangan ekonomi kita setelah tahun 2014 itu melonjak dari 0.30 menjadi 0.42 ada peningkatan 0.12 ini menyedihkan dan sudah lampu merah sebenarnya dan adalah salah satu pemicu yang mendorong kesenjangan sosial, (sehingga) masyarakat banyak yang melarikan ke soal-soal kekerasan

Perihal ketimpangan ekonomi ini juga dikuatkan oleh faktor pendidikan masyarakat kota Makassar. Semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang, semakin sedikit kesempatan ia mendapatkan

pekerjaan. Sehingga apabila melihat peluang untuk mendapatkan uang, misalnya dengan mencuri, maka terpaksa melakukannya.

Faktor kesepuluh adalah momentum Pemilihan Kepala Daerah dan atau Pemilihan Pimpinan Kampus Pada saat masa pelaksanaan Pilkada atau pemilihan pimpinan kampus, mahasiswa kemudian menjadi kelompok massa yang sangat rentan, karena ada banyak kepentingan yang tersembunyi dibalik gerakan-gerakan mahasiswa. Hal ini dijelaskan oleh Anshar Aminullah (sesi SAT PAR, pada tanggal 6 Februari 2018) yaitu sebagai berikut:

pertama bahwa konflik itu memang bisa murni, memang bisa by desain. Kenapa? Karena konflik dalam sebuah pemilu/pilkada, pada saat misalnya pasca penyelesaiannya itu sangat-sangat punya peranan penting untuk kemudian merubah opini masyarakat terkait siapa pemenang siapa yang kalah, jadi kekacauan yang bakal muncul nantinya diperlukan yaitu adalah bisa menjadi sebuah kewajiban yang harus dimunculkan dalam rangka merubah opini, jadi itu tidak main-main loh, beberapa daerah kemudian berpotensi melakukan hal seperti itu memang sudah terdeteksi, saya tidak usah sebutkan kabupaten-kabupatennya, maksud saya harapan saya mungkin adalah besok atau kapan yang kemudian bisa menjadi kasih bagi sebuah strong point untuk potensi konflik untuk pilkada serentak itu.

Muhammad Tahir (sesi SAT PAR, pada tanggal 6 Februari 2018) kemudian menjelaskan bagaimana kepentingan politik itu dapat mendompleng pada gerakan-gerakan mahasiswa termasuk kekerasan antar kelompok mahasiswa.

begini kalau misalnya di bagian kampus atau sebenarnya di dunia politik atau birokrasi itu misalnya ada pemilihan contoh salah satu, ada pemilihan lalu kita memahami bahwa masing-masing gerbong, tim sukseslah begitu yah, tim sukses sepertinya semuanya hanya mau menang tapi tidak mau menerima kekalahan, lalu kemudian dibentukkan didalam sebuah kebijakan misalnya itu pemilihan dekan, ada dekan calon ini memilih gerbong masing-masing lalu ketika ditetapkan si A jadi dekan, maka tanpa sepengetahuan atau sepengetahuan dengan calon B itu ada gerakan yang dia timbulkan supaya dimungkinkan bagaimana A ini apa yah, supaya mereka ini dalam tanda kutip masih perlu catatan-catatan yang harus ada black campaign atau macam-macam. Artinya kebijakan-kebijakan yang di ambil di dalam suatu misalnya pejabat itu ada yang merasa persoalannya ini perasaannya yah, perasaan, merasa bahwa calon yang diusung itu tidak terpilih

sehingga dengan segala macam cara itu yah bisa dilakukan yah itu tadi apa namanya kekerasan sebagai wujud untuk dapat merespon situasi agar kemungkinan apakah dapat ditinjau kembali kebijakan itu dan macam-macam itu kalau saya jawab kesana

Kalau sebenarnya aktor politik tersebut memahami konstruksi masalah konflik kekerasan antar kelompok di kampus-kampus, dia bisa memanfaatkan kerentanan mahasiswa ini untuk kepentingan tertentu, misalnya kalau mau tidak stabilkan Unhas dia sentuh itu dua fakultas itu, jangan ko sentuh yang lain ndak ada gunanya, kalau itu kau sentuh maka lahirlah kekerasan. Sebaliknya kalau yang mempunyai kepentingan mengenai isu kedaerahan maka yang dia sentuh adalah kelompok-kelompok kedaerahan. (Nazaruddin Salam, wawancara pada tanggal 15 Desember 2017)

b. Pull Factor

Faktor pertama yang menjadi penarik adalah keinginan untuk mengiksidensikan lembaga, organisasi, atau komunitas. Banyak organisasi, himpunan-himpunan, komunitas yang sering konflik atau menciptakan konflik karena merasa dirinya sudah tidak eksis. Konflik merupakan jalan yang diambil untuk eksis kembali dan menarik perhatian kepadanya. Eksistensi ini sejalan dengan keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Ada keinginan dari setiap kelompok untuk menunjukkan bahwa kelompoknyalah yang paling unggul. (Wahid Zulfikar, Anshar Aminullah, & Ramadhan, disampaikan pada sesi push & pull factor SAT pada 6 Februari 2018)

Faktor yang kedua adalah ketertarikan atas perasaan maskulinitas atau kebanggaan. Faktor berikutnya yang membuat seseorang tertarik untuk melakukan konflik kekerasan antar kelompok adalah kebanggaan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ramadhan (disampaikan pada sesi push & pull factor SAT pada 6 Februari 2018) yaitu sebagai berikut:

Kadang-kadang berkonflik adalah suatu kebanggaan. Ketika berkonflik, ia bangga. Ketika namanya ditonjolkan, dikatakan, sekarang organisasi A itu naik lagi..(karena berkonflik)... ada juga

yang anggotanya yang bangga berkonflik. Misalnya, eh tadi kena ka busur...., tadi si anu kubusurki..., tadi lemparka papporo. Ada yang merasa bangga begitu, apalagi mahasiswa baru, biasa karena doktrin. Baru 1 x pegang papporo, lempar, meledak, dia sudah cerita sama temannya. Kemarin itu waktu baku busur.... . Saya itu do'. Saya yang lempar. Dia merasa bangga.

Konflik ini juga dijadikan ajang jago-jagoan anak muda. Ketika seorang anak mulai remaja, mereka mencari aktualisasi diri. Mereka ikut perkelahian, tawuran, karena menganggap bahwa menjadi jago adalah lebih dari orang lain. Dapat meningkatkan harga dirinya dan meninggikan kepercayaan dirinya. (Itong Sule, disampaikan pada sesi push & pull factor SAT pada 6 Februari 2018)

Faktor ketiga adalah keinginan untuk melindungi diri dari ancaman atau mencari keamanan dalam kelompok. Karena sudah ada strootip permusuhan antara beberapa suku di Sulawesi Selatan, maka seseorang khawatir atau takut kalau dia tidak masuk dan terkumpul dalam suatu komunitas organda, maka tidak ada yang melindungi dia ketika terancam atau mendapat masalah dari mahasiswa daerah lain. (Ramadhan, disampaikan pada sesi push & pull factor SAT pada 6 Februari 2018)

Faktor keempat adalah keinginan untuk menjaga atau melindungi wilayah. Apabila terjadi konflik kekerasan antar kelompok, mahasiswa yang berkonflik merasa wajib untuk menjaga daerah atau wilayahnya dari ancaman pengrusakan. Contohnya fakultas Sastra, yang dekat dengan fakultas yang bermasalah, untuk menjaga daerah di sekelilingnya itu, mereka bersatu untuk melawan, misalnya fakultas Teknik, agar wilayahnya itu tetap terjaga. (Ramadhan, disampaikan pada sesi push & pull factor SAT pada 6 Februari 2018).

4.2.2.2 Analisis *Structural, Accelerator, & Trigger* (SAT)

Untuk memahami fenomena konflik kekerasan antar kelompok mahasiswa di kota Makassar, maka perlunya dibedah lebih mendalam mengenai latar belakang konflik yang terjadi. Salah satu alat bedah yang digunakan adalah *tools* SAT. berikut ini adalah hasil data yang dikumpulkan

dari wawancara dan Participatory Action Research menggunakan analisis SAT.

Tabel 4.2 Analisis SAT Konflik Kekerasan antar Kelompok Mahasiswa di Kota Makassar

Trigger	<ol style="list-style-type: none"> 1) terjadinya ketersinggungan dan/ atau terjadinya kekerasan baik secara fisikal maupun psikologi atau intimidasi kepada junior atau anggota baru di suatu kelompok, persoalan wanita, terkait wilayah, simbol/atribut dan pemimpin kelompok tersebut 2) Adanya kecurangan atau tindakan-tindakan ketersinggungan dalam Pilkada, dinamika kemahasiswaan, dan birokrasi kampus 3) Kebijakan <i>stakeholder</i> baik kampus ataupun pemerintahan bisa menjadi trigger, adanya kebijakan yang kemudian tidak populis di masyarakat, mendiskriminasi, atau dianggap merugikan mahasiswa dan berpihak pada satu sisi saja bisa memicu lahirnya konflik kekerasan antar kelompok
Accelerator	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lambatnya stakeholder mengambil kebijakan atau merespon kebijakan yang terkait kepentingan mahasiswa 2) Isu perbedaan fakultas dan perbedaan suku 3) Hoax atau informasi provokatif baik di sebar di media sosial ataupun media konvensional
Structure	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kesenjangan ekonomi yang terjadi di Masyarakat Ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh mahasiswa 2) Kegagalan institusi kebudayaan, pendidikan, dan institusi lainnya dalam memahami masyarakat

	<p>terkait budaya lokal dan nilai-nilai persaudaraan yang lebih luas.</p> <p>3) Adanya ideologi <i>ingroup</i> yang mengakar dan cenderung ekstrim,</p> <p>4) Tidak efektifnya pengawasan sosial. Tidak ada sosok yang berperan menjadi pengawasan sosial. Mahasiswa dan masyarakat Makassar yang melakukan konflik kekerasan antar kelompok</p> <p>5) masih menggunakan kekerasan sebagai salah satu opsi dalam penyelesaian masalahnya</p>
--	--

Sumber: Hasil wawancara narasumber di olah oleh penulis

a. Structural Factor

Struktural Factor yang merupakan akar konflik dan menyebabkan terjadinya konflik kekerasan Kesenjangan ekonomi yang terjadi di Masyarakat. Terkait hal ini Syamsu Rizal memberikan penjelasan terkait ancaman masalah strutural ini

Inilah gambaran demografi ekonominya kita sekarang bahwa ternyata kesenjangan ekonominya kita sekarang itu luar bisa sekali tingginya tapi faktor-faktor produksi itu dikelola oleh sedikit orang tapi kita tidak sadar karena kita relatif enjoy (terlena) kedua ancaman yang luar bisa juga adalah suku, hampir semua suku ada mi di makassar. Jadi kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang luar biasa ini adalah potensi konflik yang sedikit lagi tinggal dipicu jadi Rasio tinggi kesenjangan ekonomi luar biasa faktor-faktor pendorong konflik secara sosial itu memang ada

Faktor kedua adalah Ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh mahasiswa. Seperti contohnya adalah fasilitas bangunan yang jauh berbeda antara fakultas, atau perlakuan dan perhatian yang berbeda (Andi Ismi, Laila Arliana, disampaikan pada sesi SAT PAR, tanggal 6 Februari 2018). Faktor ketiga adalah kegagalan institusi kebudayaan, pendidikan, dan institusi lainnya dalam memahami masyarakat terkait budaya lokal dan nilai-nilai persaudaraan yang lebih luas. Faktor keempat adanya

ideologi *ingroup* yang mengakar dan cenderung ekstrim, sehingga berdampak pada solidaritas yang negatif (Aldi Akbar, Andi Ismi, Laila Arliana, disampaikan pada sesi SAT PAR, tanggal 6 Februari 2018). Ideologi *ingroup* ini menghasilkan *stereotype* antar fakultas. Berbahayanya *stereotype*, sekat-sekat antar kelompok, dan narasi kebencian ini diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya dan dapat menjadi budaya. Faktor kelima, tidak efektifnya pengawasan sosial. Tidak ada sosok yang berperan menjadi pengawasan sosial. Faktor keenam, mahasiswa dan masyarakat Makassar yang melakukan konflik kekerasan antar kelompok masih menggunakan kekerasan sebagai salah satu opsi dalam penyelesaian masalahnya. Konflik kekerasan antar kelompok dianggap sebuah manajemen konflik, di desain untuk menekan pihak tertentu untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Jalan ini adalah salah satu jalan solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah mereka. (Wahyu Hidayat, disampaikan pada SAT PAR tanggal 6 Februari).

Ideologi kekerasan ini sebenarnya juga terinternalisasi dalam budaya Bugis-Makassar karena seringkali hal ini dikaitkan dengan falsafah tiga ujung Tiga Ujung (*Tallu Cappa*)", Ali Sahab menyampaikan falsafah tiga ujung ini yaitu *pertama*, Ujung Lidah (*Cappa Lila*). Dalam menyelesaikan masalah harus dengan jalan diplomasi atau pembicaraan terlebih dahulu. Ujung Kemaluan (*Cappa Buto*). Bila cara pertama gagal, maka bisa dilakukan dengan mengadakan perkawinan antara kedua belah pihak yang bertikai. *Ketiga*, Ujung Badik (*Cappa Badik*). Apabila kedua cara di atas gagal, maka cara terakhir adalah dengan peperangan untuk mempertahankan harga diri dan menunjukkan keberanian. *Cappa Badik* juga bisa dimaknai dengan ajaran untuk meraih kehormatan hidup dengan menggunakan cara kekerasan (secara paksa) apabila memang cara pertama dan kedua di atas tidak mampu untuk dilakukan. Filosofi *Cappa Badik* inilah yang dalam perkembangan zaman (kini) menjadi alasan pembenar bagi berlangsungnya kekerasan baik di masyarakat Bugis-Makassar secara umum maupun mahasiswa khususnya.

b. Akselerator

Lambatnya stakeholder mengambil kebijakan atau merespon kebijakan yang terkait kepentingan mahasiswa. Kebijakan bisa menjadi faktor yang mempercepat dan memperluas konflik apabila tidak ada respon yang tepat dan cepat terkait permasalahan-permasalahan yang dialami mahasiswa. Ketidakpastian penyelesaian masalah mendorong mahasiswa untuk melakukan penyelesaian masalah secara mandiri, yang kerap kali dilakukan dengan menggunakan kekerasan. makanya kemudian tidak transparan dan lambat birokrasi secara struktural ini menjadi akar bentrok yang terjadi diantara lingkup mahasiswa. (Aldi Akbar dan Andi Ismi, disampaikan pada sesi SAT PAR, tanggal 6 Februari 2018). Contoh kongkrit terkait masalah ini disampaikan oleh Muhammad Tahir (disampaikan pada sesi SAT PAR tanggal 6 Februari 2018) yaitu sebagai berikut:

individu berkelahi, saya mengambil dalam konteks kampus si A berkelahi dengan si B tapi kemungkinan besar misalnya si A dan si B berasal dari etnis yang berbeda tetapi dia menjadi bagian dari organisasi organdanya itu mungkin disitu sebagai anggota atau aktif dan lain-lain sebagainya, lalu kemudian penegakan hukum lemah karena tidak di backup dengan kebijakan kampus katakanlah kalau dalam hukum positif kita nanti diproses setelah yang bersangkutan melapor supaya ada laporan polisi, nah, pertanyaannya kalau yang bersangkutan tidak melapor misalnya ada korban katakanlah B memukul A. A tidak melapor lalu kemudian tidak diproses karena alasan polisi tidak ada laporan dari individu yang bersangkutan, karena yang dianggap melapor itu adalah yang korban. Nah, kalau ini biarkan tidak diintervensi tadi, ini masudnya kami memasukkan kebijakan dalam artian birokrasi tidak mengambil itu lalu kemudian melapor kejadian itu mengambil alih entahkah itu di komisi disiplin kalau di UNISMUH atau di kepolisian, dia akan selesaikan sendiri kasusnya, maka melibatkan anunyalah tadi, itulah ada rasa ketidakadilan yang dia terima dari perlakuan itu maka dia selesaikan sendiri maka etnis ini yang turun itu yang sering terjadi Bagaimana pak? Saya selalu dianu sama anunya, apa, mohon maaf yah organda. Itu ada anggota yang dipukul kenapa tidak diproses? Tunggu dulu ananda 1 2 3 hari maksudnya begitu, ternyata yang bersangkutan tidak melapor-lapor juga, yah dia ambil jalan sendiri, seharusnya disitu kebijakan kampus. Karena saya rasakan, karena saya evaluasi satu tahun

periode saya ini ternyata di situ titik anunya, bahwa segera, kampus harus mengambil alih, karena selama ini saya berharap komisi disiplin bergerak, tapi rupanya juga tidak cepat komisi disiplin ini, nah, akhirnya dia selesaikan sendiri, apa etniknya, organda ini menyelesaikan sendiri, yah itulah tadi, mungkin dengan turun, memukul tadi kemudian membalas pukulan, besoknya lagi datang yang habis dipukul, sehingga terbentuk lagi antara etnis ini, sehingga kedua pihak berhadapan dari gara-gara itu

Faktor akselerator berikutnya adalah isu perbedaan identitas sosial yaitu perbedaan fakultas dan/ atau perbedaan suku. Hal ini disebabkan oleh streatip dan/atau narasi kebencian dan permusuhan kepada kelompok lain. Hal ini juga terkait harga diri kelompok masing-masing. Contohnya adalah narasi permusuhan dan kebencian antara kelompok IPMIL (organisasi daerah Palopo dan gabungan daerah Luwu) dengan kelompok mahasiswa Bone, Bulukumba, dan Jeneponto atau antara Fakultas Teknik dan Sospol di Unhas, Teknik dan Seni di UNM, dan lain sebagainya. (Aldi Akbar, Andi Ismi, dan Laila Arliana, disampaikan pada sesi SAT PAR, tanggal 6 Februari 2018). Dampaknya adalah, jika terjadi ketersinggungan antara kedua belah pihak yang sudah tertanam streatip permusuhan maka responnya akan cepat sekali menjadi tindakan kekerasan. Wahid Zulfikar menjelaskan mengenai hal ini, sebagai berikut:

kohesifitas kelompok, kalau tadi dikatakan ada senior yang tidak lagi mendengarkan apa lagi sebenarnya penyebabnya, tolong dikumpuli apa alasannya, apa latar belakang sebenarnya sehingga itu adalah kohesifitas kelompok, kita sudah tidak mau lagi melihat apa alasannya, selama kita punya anggota diganggu itu adalah masalah saya juga

Akselerator berikutnya adalah Hoax atau informasi provokatif baik di sebarakan di media sosial ataupun media konvensional berupa berita-berita miring, kabar burung yang tidak di tau kebenarannya, itu biasanya yang berimbas ke telinga mahasiswa dapat memperluas dan mempercepat terjadinya eskalasi konflik. (Laila Arliana, disampaikan pada sesi SAT PAR, tanggal 6 Februari 2018), bahkan menurut Anshar Aminullah menjelaskan

memang ada kepentingan media terkait fenomena ini konflik kekerasan antar kelompok ini. Para pembuat berita menginginkan berita yang kontroversional sehingga menarik perhatian publik, namun bahayanya informasi yang dibuat kadang kala mem-*blow up* konflik yang sedang terjadi antara kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan bergeraknya massa di luar lokasi kejadian untuk saling membantu. (Anshar Aminullah, disampaikan pada sesi SAT PAR, tanggal 6 Februari 2018),

c. Trigger

Trigger adalah peristiwa awal yang memicu awal mulanya terjadi konflik kekerasan antar kelompok. Berikut ini beberapa pemicu tersebut. Pertama adalah terjadinya ketersinggungan, terjadinya kekerasan baik secara fisik maupun psikologi atau intimidasi. Ketersinggungan biasanya terjadi apabila junior diganggu, seperti yang dicontohkan oleh laila Arliana sebagai berikut:

Senior tidak tahu juniornya dipukul karena apa, ditegur karena apa, tiba-tiba langsung marah, tiba-tiba langsung menyerang, makanya disini kurangnya komunikasi antar mahasiswa, terkadang senior yang mendengar kabar ini dia tidak berfikir panjang, yang ada di dalam dirinya hanya emosi karena juniornya dipukul, mungkin kurang lebih seperti itu yah. (Laila Arliana, disampaikan pada sesi SAT PAR, tanggal 6 Februari 2018)

Aldi Akbar juga menyampaikan hasil diskusi PAR bahwa Ketersinggungan juga biasanya terjadi apabila terkait dengan wanita. Biasanya wanita yang dianggap harus dilindungi oleh kelompok, dan harus di bela jika diganggu oleh kelompok lain. (disampaikan pada sesi SAT PAR, tanggal 6 Februari 2018)

Ketersinggungan juga terjadi apabila terjadi pengusikan terhadap wilayah yang diklaim dikuasai atau dimiliki oleh kelompok tertentu. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Wahid Zulfikar disampaikan pada sesi SAT PAR, tanggal 6 Februari 2018) sebagai berikut:

saya memahami bahwa setiap dari kita punya zona nyaman masing-masing, punya zona yang tidak ingin diganggu oleh

kelompok lain atau orang lain. Saya menganggap bahwa konflik itu terjadi apabila ada suatu tujuan yang ingin kita capai namun cenderung terhalangi oleh kelompok lain atau dimasuki area kita oleh kelompok lain, sehingga yang saya katakan tadi yang dimaksudkan oleh zona nyaman, kenyamanan itu yang saya maksud ekspansi, daerah kita oleh kelompok lain sehingga bisa menjadi pemicu suatu konflik.

Nazaruddin Salam (wawancara pada 15 Desember 2017) juga membagikan pengalamannya mengelola konflik yang senada dengan ketersinggungan wilayah tersebut. Contohnya adalah ada daerah yang diklaim milik Teknik yang tidak boleh mahasiswa fakultas tertentu melintas di daerah tersebut atau di daerah Jasa Boga yang belum boleh mahasiswa baru masuk, ketika ada yang dilihat mahasiswa baru masuk jasa boga seniornya memukul mahasiswa tersebut, dan ternyata bukan mahasiswa dari Teknik. Nah, inilah lagi yang memicu tawuran antar kelompok

Ketersinggungan ini juga dapat terjadi apabila ketersinggungan ini terkait dengan pemimpin lembaganya. Apabila leader dari satu kelompok merasa dilecehkan, merasa dipandang enteng, ataupun disentuh dalam artian mendapatkan kekerasan secara fisik dari kelompok lain. Hal ini dijelaskan oleh Muhammad Tahir (disampaikan pada sesi SAT PAR tanggal 6 Februari 2018) yaitu sebagai berikut:

Jangan disentuh leader, mungkin hanya disinggung dengan kata-kata tertentu, mungkin leadernya menerima itu suatu hal karena kesadaran sebagai seorang pemimpin tapi ini yang kalangan bawah ini yang tidak mau menerima itu, inilah yang biasa memprovokasi untuk bisa melakukan, jadi memang faktor ketersinggungan juga, entahkah dengan cara bentuk fisik atau dengan kalimat yang apa namanya tersinggungan karena kata-kata yang diserang dengan kalimat-kalimat yang kurang tepat begitu itu akan menimbulkan sesuatu, di UNISMUH pernah juga terjadi dengan cepat sekali itu kalau leader yang tersentuh atau tersinggung. Saya mohon maaf ini, leader itu simbol lembaganya, leader itu simbol organisasinya, simbol komunitasnya. Jadi kalau leadernya yang di anu itu dianggap bahwa itu mencederai komunitasnya, lembaganya dan seterusnya.

Ketersinggungan terhadap atribut identitas kelompok juga dapat memancing terjadinya tawuran, hal ini disampaikan oleh Nazaruddin Salam (wawancara pada 15 Desember 2017). Atribut itu dapat berupa lambang identitas kelompok, misalnya lambang Teknik, misal dirobek atau dibakar. Atribut-atribut ini menjadi identitas kelompoknya yang dianggap sakral sehingga memicu adanya tawuran

Berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketersinggungan yang dapat memicu terjadinya konflik kekerasan antar kelompok apabila ketersinggungan ini terkait dengan junior atau anggota baru di suatu kelompok, persoalan wanita, terkait wilayah, dan pemimpin kelompok tersebut.

Kebijakan stakeholder juga bisa bersifat memicu lahirnya konflik kekerasan antar kelompok. (Andi Ilma & Wahid Zulfikar, disampaikan pada sesi SAT PAR, tanggal 6 Februari 2018) Biasanya kebijakan yang memicu adalah kebijakan yang tidak populis, mendiskriminasi, atau dianggap merugikan mahasiswa dan berpihak pada satu sisi saja. Seperti misalnya kenaikan uang SPP atau operasional kampus.

Adanya kecurangan atau tindakan-tindakan ketersinggungan dalam beberapa hal, misalnya dalam pemilihan pilkada, terus kemudian kecurangan yang terjadi dalam dinamika organisasi kemahasiswaan, serta dalam lingkungan birokrasi kampus juga dapat memicu peristiwa konflik tawuran.

Kebijakan *stakeholder* baik kampus ataupun pemerintahan juga bisa menjadi trigger, adanya kebijakan yang kemudian tidak populis di masyarakat, mendiskriminasi, atau dianggap merugikan mahasiswa dan berpihak pada satu sisi saja itu bisa memicu terjadinya konflik besar-besaran, misalnya kebijakan tentang upah buruh atau kebijakan tentang penanaman modal asing dan yang lain-lainnya, itu bisa untuk melangsungkan lahirnya sebuah kebijakan yang tidak populis itu bisa sangat menjadi *trigger* lahirnya sebuah konflik sosial atau kebijakan tersebut terkait dengan kepentingan mahasiswa seperti kenaikan biaya SPP atau operasional kampus, sanksi akademik terhadap anggota

organisasinya, atau kebijakan lain yang dianggap merugikan mahasiswa dan hanya menguntungkan pihak birokrasi saja. (Andi Ismi, Aldi Akbar, & Wahid Zulfikar, disampaikan pada sesi SAT PAR, tanggal 6 Februari 2018)

4.2.3 Strategi Intervensi Sosial terhadap Konflik Identitas di Masyarakat Kolektif

Strategi intervensi yang disusun mengawinkan antara strategi intervensi sosial dan spektrum aktivitas perdamaian dan keamanan *United Nation* yang mana datanya dikumpulkan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research*. Analisis strategi ini dimulai dengan memaparkan visi dan misi perubahan yang menjadi arah gerak bersama dalam rancangan desain strategi ini dan berikutnya akan memaparkan strategi *conflict prevention*, dan *peace building*

4.2.3.1 Visioning

Malik (2009) memaparkan Visi adalah suatu pandangan ke depan tentang kondisi ideal yang ingin dicapai melalui serangkaian proses kegiatan intervensi. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan hasil kegiatan *Participatory Action Research* maka dirumuskanlah visi perubahan yaitu “Makassar adalah rumah kita bersama”. Visi ini menggambarkan pandangan keinginan bersama untuk menjadikan Makassar sebagai rumah (tempat yang nyaman) bagi seluruh golongan dan kelompok. Sebagaimana disampaikan oleh Akbar (disampaikan pada sesi visioning PAR tanggal 6 Februari 2018) sebagai berikut:

Makassar adalah rumah kita, Tak ada lagi aku, tidak lagi kamu, tidak ada lagi kami, yang adalah KITA. Maksudnya tidak ada lagi kekerasan, fokus membangun masa depan dengan prinsip yang implementasi pembangunan yang partisipatif secara menyeluruh dengan berpegang pada nilai budaya adalah prinsip yang harus dikedepankan secara bersama

Visi ini kemudian diturunkan menjadi beberapa misi perubahan yang dirangkumkan dari seluruh hasil diskusi kelompok dan diskusi pleno yang dilakukan pada kegiatan *Participatory Action Research*, yaitu sebagai berikut:

- a. Menguatnya kekitaan di Kota Makassar
- b. Tumbuh dan menguatnya budaya dan nilai-nilai kearifan lokal dalam lingkup masyarakat dan dunia pendidikan kampus untuk melawan narasi kebencian, permusuhan, dan kekerasan, misalnya Sombere, silussureng, dan lain-lain.
- c. Menguatnya nilai-nilai perdamaian dan tertanamnya budaya *non-violence approachment* pada pemuda, mahasiswa, dan masyarakat Kota Makassar
- d. Runtuhnya streatip, prejudice, dan narasi kebencian antara kelompok-kelompok di masyarakat
- e. Menguatnya ketahanan diri dan kelompok dalam merespon potensi konflik kekerasan
- f. Berkurangnya kekerasan dan konflik kekerasan khususnya antar kelompok mahasiswa di Kota Makassar
- g. Kampus bertransformasi menjadi kampus kepemimpinan yang menjadi rumah kita semua untuk menguatkan kemampuan akademik dan pengembangan diri.
- h. Mengimplementasikan prinsip pembangunan partisipatif oleh seluruh masyarakat khususnya keterlibatan kaum muda.
- i. Terjalin dan menguatnya jejaring publik untuk menguatkan ketahanan masyarakat dalam merespon konflik kekerasan

Dalam rangka bergerak menuju visi perubahan dan melakukan misi perubahan tersebut maka disusunlah strategi intervensi bersama untuk mencegah dan menanggulangi konflik kekerasan antar kelompok Mahasiswa di Kota Makssar.

4.2.3.2 *Conflict Prevention & Peace Building*

Strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam fase misi pencegahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.3 Strategi Intervensi Sosial (*Conflict Prevention*)

Peace Building & Conflict Prevention	
Regulasi atau kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Trace study simpel kepemimpinan • Penelitian dan pengumpulan data secara berkelanjutan dengan memanfaatkan aplikasi dan media online • Membangun dan/atau menguatkan Conflict Early Warning and Respon System • Transformasi sistem pengkaderan lembaga atau organisasi mahasiswa kearah non violence • Transformasi palayanan akademik dan kemahasiswaan kampus-kampus secara komprehensif. Transformasi ini dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> ○ Perbaikan dan pelaksanaan tata tertib secara tegas ○ Menghadirkan konseling untuk isu-isu sensitif di mahasiswa ○ Penguatan SOP pengamanan dan pencegahan konflik ○ Menghadirkan dosen-dosen muda sebagai sosok pendamping akademik ○ Rekayasa ruang dan interaksi mahasiswa yang sistematis untuk membangun kekitaan, kebersamaan, dan persaudaraan. ○ Menguatkan peran-peran kegiatan ekstra atau komunitas untuk mahasiswa yang melibatkan latarbelakang mahasiswa yang beragam

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pelibatan semua pihak di dalam kampus untuk terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan ○ Membuka dan mendorong keterlibatan publik (NGO, Yayasan, LSM, dan lain-lain yang terkait) untuk ikut membangun komunitas yang damai dan anti kekerasan di kampus-kampus ● Mendorong lahirnya rekonsiliasi antar kelompok yang terkait ● Mendorong lahirnya momen atau simbol yang dapat menjadi memori kolektif tentang pembangunan kesepakatan perdamaian ● Mendorong kampanye-kampanye bermuatan perdamaian dan anti konflik kekerasan
Capacity Building	<p>Capacity building kepada simpul kepemimpinan mahasiswa, kepolisian, media, dan pemerintah serta kepada kelompok rentan, mahasiswa baru, atau anggota organisasi organisasi daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Memahami dan menguatkan Kekitaan ● Membumikan Sombere ● Non violence approachment ● Penguatan pemahaman terkait perdamaian dan resolusi konflik kepada simpul kepemimpinan ● Penguatan pada pengamanan ● Pemahaman akan akar pola dan bentuk latar belakang konflik antar kelompok ● Penguatan ketahanan diri dan kelompok seperti critical thinking, anti hoax ● Jurnalisme damai dan sejuk ● Pendidikan karakter dan budaya

Empowering	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong keterlibatan simpul-simpul kepemimpinan dalam program conflict prevention dan peace building di tiap universitas dan organisasi daerah di Makassar • Bridging social capital (Project sosial bersama, aktivitas olahraga bersama, festival perdamaian, dan kegiatan positif lainnya yang dilakukan secara kolaboratif) • Mendorong keterlibatan publik untuk ikut terlibat dalam misi mengurangi konflik kekerasan antar kelompok • Mendorong peran kepolisian dalam misi conflict preventif dan peace building di kampus-kampus
Networking	<ul style="list-style-type: none"> • Berjejaring dengan media • Menjejaringkan simpul-simpul kepemimpinan organisasi atau komunitas terkait • Forum silaturahmi atau dialog mahasiswa se-kota Makassar • Penguatan jaringan antar institusi (kampus, keamanan, dan pemerintahan) • Berjejaring dengan kelompok rentan • Berjejaring dengan Kemensos melalui program keserasian sosial, kearifan lokal, desa berketahanan, dan program-program lainnya

Sumber: Hasil wawancara narasumber dan hasil diskusi participatory action research di olah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas ada beberapa strategi yang perlu mendapatkan penegasan lebih. Yang menarik adalah dalam strategi di atas ada yang disebut namanya *trace study* leadership mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk betul-betul mengenali dan berjejaring dengan simpul-simpul kepemimpinan yang ada. Tidak hanya sebatas pemimpin formalnya. Alwy Rachman (disampaikan pada sesi Strategi Intervensi PAR tanggal 7 Februari 2018) menyatakan pendapatnya terkait hal ini:

trace study tentang leadership mahasiswa, jadi begini menurut saya. Jadi di Unhhas itu kami baru-baru melakukan penelitian terhadap semua aktivis. Ketua BEM, ketua Himpunan, kami mau tahu seperti apa sosok mereka, misalnya apakah mereka itu memang berasal dari keluarga yang banyak pemimpin, ataukah mereka sebenarnya tidak mempunyai jejak kepemimpinan di silsilah keluarganya, ataukah dia hanya sekedar menghabiskan waktu di lembaga kemahasiswaan. Apa gunanya itu? Gunanya adalah untuk dosen-dosen dan pengambil kebijakan di Unhas, meyakini, meyakinkan apakah mahasiswanya itu bisa melihat bahwa kepemimpinan mahasiswa di kampus itu adalah bagian dari masa depan mereka

Berikutnya terkait dengan rekayasa interaksi mahasiswa, Nazaruddin Salam (wawancara pada 15 Desember 2017) menjelaskan beberapa upaya yang dilakukan dan dirasa cukup berhasil meredam konflik di Unhas, yaitu dengan membangun atmosfer akademik yang beragam. Pada awal perkuliahan, dalam satu kelas itu terisi dari mahasiswa dari 14 Fakultas yang ada di Unhas. Gedung perkuliahan dibuat umum tidak terkotak kotakkan oleh program studi atau jurusan. Sistem seperti ini dibangun agar lahir interaksi antara identitas-identitas kelompok yang berbeda

Berikutnya yang menarik dialami adalah mengenai Sombere, menurut Syamsu Rizal (wawancara pada tanggal 1 Februari 2018) *Sombere* itu sebenarnya karakter yang sudah membudaya sudah menjadi karakter orang Makassar (kota.red). Sombere ini dianggap sebagai kearifan lokal yang menjadi padanan misi kota Makassar yaitu menjadi *smart city*. Padunya antara kemajuan teknologi dengan kearifan lokal yang ramah, *humble, hospitality*. Kearifan lokal inilah yang gencar di sosialisasikan pemerintah, yang mana salah satunya untuk meredam konflik kekerasan

antar kelompok di Makassar. Menurut Syamsu Rizal, jika seseorang terinternalisasi dalam dirinya nilai sombere, maka orang itu tidak gampang marah, tidak gampang meletus, tidak gampang membalas, tidak gampang mendendam, tidak boleh asosial. Jadi kalau kita sudah merasa orang Makassar, berarti kita sudah harus lepas dari karakter-karakter yang sifatnya negatif itu, menjadi kontra indikasi dari budaya tersebut.

Menariknya adalah, nilai sombere inilah yang digunakan pemerintah untuk mengcounter narasi kekerasan dan konflik kekerasan yang ada di Kota Makassar. Menurut Syamsu Rizal (wawancara pada tanggal 1 Februari 2018) Sombere ini untuk menguatkan ketahanan sosial. Dari penjelasan ini, kita bisa memahami bahwa Sombere dijadikan counter narasi dari salah persepsi masyarakat tentang budaya Siri'. Karena orang yang salah menafsirkan Siri' kecenderungannya adalah reaktif marah apabila terjadi ketersinggungan.

4.2.3.3 *Peace Making & Peace Keeping*

Tabel 4.4 Strategi Intervensi Sosial (Peace Making & Peace Keeping)

Peace Making & Peace Keeping	
Regulasi atau kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta kepada seluruh pimpinan universitas atau tokoh yang didengar oleh mahasiswa untuk turun ke lapangan meleraikan mahasiswa • Kalau pihak berkonflik menggunakan senjata dan massanya banyak, cenderung tidak bisa lagi dileraikan oleh pimpinan atau keamanan kampus maka segera meminta bantuan kepolisian • Koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menurunkan satuan kepolisian untuk meleraikan • Memastikan kebijakan memanggil kepolisian dilakukan secepatnya dan sesegera mungkin, supaya menghindari keterlambatan peleraian

	<p>yang dapat menimbulkan dampak yang lebih besar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika kondisinya masih panas dan cenderung masih berbahaya maka dilakukan strategi mendinginkan suasana dengan meliburkan mahasiswa • Memastikan suasana kondusif untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. • Memastikan lahirnya kesepakatan perdamaian • Menghukum secara tegas dan adil semua pihak yang terbukti terlibat memicu, memprovokasi, dan/atau memperbesar eskalasi konflik • Mendorong lahirnya SOP penanganan konflik tawuran yang melibatkan semua pihak terkait • mendorong berbagai macam bentuk kampanye-kampanye yang bermuatan perdamaian apakah misalnya poster-poster kita mereproduksi terus hal tersebut kita membuat iklan-iklan yang bahasanya itu mengajak kita untuk lebih mengenali kebudayaan kita nilai-nilai persaudaran kita serta nilai-nilai perdamaian kita.
Capacity Building	<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya pihak keamanan internal kampus untuk mendapatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi suatu konflik • Pimpinan kemahasiswaan harus mendapatkan pemahaman dan gambaran mengenai fenomena konflik yang mereka alami, apa akar masalahnya, kenapa bisa seperti itu, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi • meningkatkan keterampilan, refleksi dan memaafkan. Yang ini yang dibutuhkan bagaimana orang-orang yang bertikai itu punya

	<p>kemampuan untuk merefleksi apakah yang dilakukan ini benar atau tidak, yah seperti itu dan mau memaafkan</p>
Empowering	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pimpinan untuk mendeteksi dan memproteksi mahasiswa (turun langsung di lapangan) • Berkoordinasi dengan simpul pemimpin di mahasiswa untuk tidak mengarahkan anggotanya • Berkoordinasi dengan simpul kepemimpinan untuk meminta menarik dan menahan anggotanya untuk tidak terlibat • Mendorong semua pihak untuk mensosialisasikan hasil perdamaian • Mediasi yang dilakukan adalah mencoba menghubungkan antara kelompok-kelompok yang berkonflik sederhananya kita mengetahui apa sebenarnya inti permasalahan diantara kedua kelompok yang saling bersinggungan, makanya kemudian kita memediasi untuk mempertemukan apa akar permasalahan di kelompok yang berkonflik ini
Networking	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi ke simpul-simpul kepemimpinan di masing-masing kelompok • Sesegera mungkin mempertemukan pemimpin-pemimpin antar kelompok, merajut kembali komunikasi antar kelompok yang berkonflik, akhirnya adalah melalui rekonsiliasi, mempertemukan kembali melalui silaturahmi antara kelompok-kelompok yang berkonflik, • Berjejaring dengan seluruh pihak baik mahasiswa, keamanan, dan lainnya yang terkait

	<p>agar kalau ada informasi early warning terjadinya konflik segera di respon dengan cepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuka ruang bagi pihak ke-3 untuk masuk memediasi kelompok-kelompok yang bertikai
--	---

Sumber: Hasil wawancara narasumber dan hasil diskusi participatory action research di olah oleh penulis

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Karakter Kebudayaan Kolektivisme terhadap Konflik Kekerasan antar Kelompok Mahasiswa di Kota Makassar

Sebagaimana di bagian pendahuluan penelitian ini telah dipaparkan data yang ada menunjukkan masyarakat Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya memiliki dimensi kebudayaan kolektivisme yang tinggi. Dapat dilihat pada tabel 2.1 Bangsa Indonesia menduduki peringkat 3/4 dari 50 negara yang diukur dalam penelitian yang dilakukan oleh Geert Hofstede (1997), namun perlu dipahami penelitian yang dilakukan oleh Hofstede adalah di level nasional, sehingga perlu kembali meninjau manifestasi budaya kolektivisme ini dalam kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar.

Hofstede (1997) sendiri menjelaskan bahwa budaya kolektivisme ini memanifestasikan dirinya dalam symbols, heroes, rituals, dan value. Sistem nilai utama yang dijelaskan Hofstede (1997) tentang masyarakat kolektif adalah kelompok masyarakat ini lebih mementingkan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan dirinya sendiri sebagai individu. Hal ini senada dengan filosofi (sistem nilai) masyarakat Bugis-Makassar yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu *Mali siparappe* (hanyut saling menyelamatkan), *Rebba sipatokkong* (tumbang saling menegakkan), *Malelu Sipakainge* (terlupa saling mengingatkan), *taro ada taro gau* (berjanji sama menunaikan), *fada idi fada elo* (jalin tekad dalam kebersamaan), budaya tudang sipulung, masussureng, siri' ku tu siri' nu to. Silessoreng

yang maknanya menganggap diri bersaudara seibu kandung, kalau persaudaraannya tinggi berarti “sirenrengperru”: saling membantu. Hal ini merupakan contoh dari sistem nilai budaya kolektif yang menjadi inti kebudayaan.

Nilai-nilai inilah yang menentukan sesuatu baik atau buruk, jahat atau baik, salah atau benar, jelek atau cantik, natural atau tidak natural, normal atau tidak normal, logis atau tidak logis, dan rasional atau tidak rasional (Hofstede, 1997, p. 8). Jadi, adalah suatu kesalahan atau kekeliruan bagi masyarakat Kota Makassar yang tidak saling menyelamatkan, tidak saling membantu, tidak saling menegakkan dan lain sebagainya apabila saudaranya atau keluarganya mengalami kesulitan atau kesusahan. Karena hal itu akan melukai sistem nilai yang ada di masyarakat Kolektif.

Manifestasi Budaya Kolektif dalam bentuk Ritual bagi masyarakat kota Makassar contohnya mengenai kebiasaan masyarakat kota Makassar untu menunduk atau bahasa bugisnya “tabe’, tabe’, tabe’”. perlu kita kembalikan kepada yang dulu-dulu. Menghargai orang tua. Menghargai yang senior. (Burhan, Sesi *visioning* PAR, pada tanggal 7 Februari 2018).

Terkait apa yang dijelaskan Alwy Rachman (Wawancara pada 24 Januari 2018) mengenai harus ada patron bapak dalam suatu kaum (masyarakat kolektif). Hal ini senada dengan apa yang dia sampaikan Hofstede (1997) dalam teorinya yang mengatakan pada masyarakat yang memiliki nilai kolektivisme yang tinggi maka nilai *power distance*-nya pun juga tinggi. Apa yang disebutkan pak Alwy mengenai faktor kepemimpinan tokoh-tokoh wisdom di masyarakat Sulawesi Selatan dalam kehidupan bersama adalah wujud nyata dari manifestasi tingginya *Power Distance* yang berarti tinggi pula kolektivisme masyarakat Sulawesi Selatan. Inilah yang menyebabkan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Makassar sangat hormat dan tunduk pada orang atau tokoh yang dituakan dalam masyarakat. Bentuk peran tokoh wisdom ini tersirat dari pernyataan Syamsu Rizal (Pleno Discussion PAR pada tanggal 6 Februari 2018) sebagai berikut:

..... Alhamdulillah kita (di Makassar) masih memiliki patron untuk diikuti terutama dari tokoh agama, masyarakat, publik figur (contohnya) masih ada karaeng ta masih ada puang ta. Itulah kenapa Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar masih dikatakan kuat. Jadi saya itu jengkel kalau ada orang endak mau cium tangannya ulamanya, yang endak mau mi membungkuk klo ketemu dengan orang tuanya karena dia nda mengerti ini adalah salah satu ekspresi sosial yang menjadi katalisator untuk mengurangi konflik sosial

Tokoh-tokoh wisdom ini berupa kiyai-kiyai, pastor, ulama, tokoh masyarakat, dan pemimpin publik ataupun simpul-simpul kepemimpinan di *grassroot* yang menjadi aktor penting dalam kehidupan masyarakat kolektif. Hal ini dikategorisasikan Hofstede (1997) dalam diagram bawang (lihat gambar 2.3) sebagai *Heroes*, yaitu sosok orang, hidup ataupun telah meninggal, nyata atau imajinasi, orang yang sangat disegani dalam suatu budaya.

Manifestasi budaya kolektivisme juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menghargai simbol-simbol kelompoknya, simbol-simbol itu dapat berupa kata-kata, gestur, gambar, atau benda yang mengandung makna dalam budaya di dalamnya. Biasanya simbol ini berupa atribut-atribut identitas sosial yang dimiliki. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya simbol-simbol identitas kelompok seperti lambang, atribut, wilayah, sekretariat dan lainnya menjadi hal yang sakral, dan apabila ada pihak yang memperlakukannya dengan tidak baik atau merusak dengan kasar maka ketersinggungan yang dapat memicu konflik kekerasan antar kelompok dapat terjadi.

Secara umum bagi seluruh manusia keluarga adalah hal yang terpenting, sesuatu yang mendasar yang harus disayangi, dijaga, dan dilindungi. Pada dasarnya semua orang pasti akan melindungi dan siap membela jika keluarganya di ganggu atau dilecehkan. yang menarik ditinjau adalah bagi masyarakat kolektif, "keluarga" tidak hanya ayah, ibu, saudara yang terikat hubungan darah, namun juga orang-orang yang hidup dekat bersama seperti kakek, nenek, tante, paman, dan lainnya. Hofstede menjelaskan ini dengan istilah *extended family*. Secara lebih sederhana

terkait extended family, dapat dilihat dari apa yang disampaikan oleh Nazaruddin Salam (Wawancara pada 15 Desember 2017):

Karakter orang makassar itu peduli hal ini dapat dilihat ketika ada kecelakaan di jalan, macetnya luar biasa, semua orang singgah memastikan apakah keluarga atau kerabatnya, minimal mereka melambat, kalau di tempat lain tidak seperti itu, semua sibuk dengan urusannya. Kalau di sini tinggi sekali solidaritasnya dengan sesama teman

Sejalan dengan beriringnya waktu anak-anak mulai tumbuh dewasa dan sudah mulai mengikat dirinya dalam satu identitas sosial. Hofstede (1997) mengistilahkan mereka mulai belajar melihat dirinya sebagai bagian dari “we group”. Alwy Rachman (Wawancara pada 24 Januari 2018) menjelaskan ini sebagai masuknya identitas sekunder dalam diri seseorang. Sedangkan Ichsan Malik (wawancara pada tanggal 26 Desember 2017) memaparkan sebagai berikut:

Seseorang ya awalnya ketika masih bayi, kita tidak mempunyai identitas, identitasnya yah sebagai manusia, seseorang mulai memiliki identitas itu yang pertama adalah identitas etnis, ketika dia pertama kali belajar bahasa ibu, menjadi ambon, makassar, aceh, karena itu yang biasanya diajarkan pertama, setelah itu baru diajarkan identitas agama, seperti itu di Indonesia. Karena kita mulai belajar agama mulai 7 tahun, tapi kalau identitas etnis ketika 2-3 tahun sudah mulai belajar identitas etnisnya. Identitas politik dan ekonomi baru terbentuk saat berumur 17 tahun, misalnya pada usia SMA baru mengerti mengenai ekonomi dan politik, Cuma kita lihat di Indonesia mana yang lebih kuat sih? Etnik, agama, politik, atau ekonomi? Kita lihat yang kuat adalah dua yang pertama adalah agama dan etnis. Saya kira seperti itu proses pembentukan identitas itu.

Ketika anak belajar dengan bahasa ibunya, maka disitulah mulainya identitas etnis masuk ke dalam dirinya. Perlu disadari yang terinternalisasi dalam dirinya tidak hanya bahasa ibu, namun segala kebudayaan yang diwujudkan dalam tingkah tingkah laku, prilaku dari orang tua itu terinternalisasi ke dalam diri individu. Disinilah bagaimana seorang anak belajar tentang budaya kolektivisme atau sebaliknya individualisme. Sebagaimana Hofstede (1997) sampaikan bahwa Kebanyakan informasi ini telah diperolehnya pada masa kecilnya, karena

pada masa itulah seseorang paling mudah untuk dipengaruhi untuk mempelajari atau mengasimilasi sesuatu, program tersebut lahir dari interaksi sosial di dalam keluarga, antar lingkungan tetangga, di sekolah, di dalam kelompok pemuda, di tempat kerja, dan di komunitas masyarakat.

Ketika individu telah memilih kategorisasi dirinya masuk dalam kelompok identitas yang mana. Misalnya yang menguat adalah kategorisasi etnik dari individu tersebut, agama, atau wilayah tempat tinggal. Setelah masuk dalam kelompok identitas sosial inilah maka terbentuklah *ingroup* dan *outgroup* (Ichsan Malik, wawancara pada 26 Desember 2017). Hofstede (1997) Kelompok sosial yang terpisahkan di sebut “they group”. Pada fenomena konflik kekerasan antar kelompok mahasiswa di Makassar, *we group* dan *they group* ini juga terjadi dengan kategorisasi yang menguat adalah identitas kelompok suku dan/atau fakultas. Ichsan Malik menyatakan, nanti ada yang disebut dengan *ingroup favoritism*, dia merasa bahwa kelompok dialah yang paling baik, lalu akan terbentuk *group think*. Inilah yang kemudian membentuk *stereotype* dan prasangka (wawancara pada 26 Desember 2017), dimana *prejudice* dan prasangka terhadap kelompok lain inilah yang menjadi awal mula konflik kekerasan antar kelompok.

Berdasarkan teori Hofstede (1997), yang akan terjadi apabila masyarakat kolektif mengingkari atau melukai sistem nilai, ritual, heroes, dan simbol ini adalah timbulnya perasaan malu dan kehilangan muka bagi diri sendiri dan di dalam kelompok sosialnya. Manifestasi norma budaya kolektif ini dalam kebudayaan di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar adalah dalam budaya *Siri'* yang artinya adalah “malu”.

Itulah kenapa sikap mental orang Bugis-Makassar memiliki falsafah hidup “*Aja mupakasiriwi, materi-tu*”. Jangan permalukan dia, sebab dia akan memilih lebih baik mati daripada dipermalukan. Kedua, “*Ajamullebbaiwi, nabokoiko-tu*”. Jangan kecewakan dia, sebab jika dikecewakan pasti meninggalkan anda (Ali Sahab dan Fahrul Muzaqqi, 2011). Bagi masyarakat Bugis-Makassar, menjaga harga dirinya supaya tidak dipermalukan adalah hal yang sangat mendasar. Dia bersedia

mempertaruhkan harta bendanya bahkan dengan nyawanya, *“lamua narisappa warangparange, nasaba rialai pallawasirik. Narekko sirik Ba’na Lao, sungenatu naranreng.”*

4.3.2 Latar Belakang Konflik Kekerasan Antar Kelompok di Kota Makassar

Dengan mendapatkan kesimpulan hubungan erat antara budaya masyarakat kota Makassar dengan budaya kolektivisme kita bisa membahas latar belakang konflik kekerasan antar kelompok ini dengan menggunakan kaca mata atau perspektif budaya kolektivisme.

Pada bagian ini peneliti mencoba membahas mengawinkan antara latar belakang konflik kekerasan antar kelompok di Kota Makassar dengan persepektif budaya kolektivisme. Kita lihat mulai dari pemicu yang timbul karena terjadinya ketersinggungan dan/ atau terjadinya kekerasan baik secara fisik maupun psikologi atau intimidasi kepada junior atau anggota baru di suatu kelompok, persoalan wanita, terkait wilayah, simbol/atribut dan pemimpin kelompok tersebut. Hal ini menarik karena sesuai dengan apa yang dipaparkan sebelumnya budaya kolektivisme itu termanifestasikan dirinya dalam symbols, heroes, rituals, dan value. (Hofstede, 1997)

Pembahasan pertama untuk masalah value, dalam perspektif seluruh manusia keluarga adalah yang terpenting. Semua akan merasa tersinggung dan marah apabila ada orang yang melukai dan melecehkan keluarga saya, dalam artian individu dalam keluarga atau nama baik keluarga. Konsep budaya kolektivisme sebagai extended family menjelaskan mengapa ketika junior atau wanita dari satu kelompok tertentu dilecehkan, diganggu, atau dipukul maka reaksi dari masyarkat kolektif akan sangat agresif untuk membela bahkan membalas perbuatan tersebut. Bagi mahasiswa Makassar yang notabene adalah masyarakat kolektif menganggap junior itu ibarat anak yang harus dijaga dan dilindungi, begitu pula dengan wanita di dalam satu kelompok. Bagi mahasiswa Makassar yang notabene adalah masyarakat kolektif menganggap junior itu ibarat

anak yang harus dijaga dan dilindungi, begitu pula dengan wanita di dalam satu kelompok. Melindungi keluarga dalam hal ini extended family adalah nilai yang mendasar yang kadang tidak bisa ditoleransi. Mengutip dari penjelasan karakteristik kolektivisme oleh Hofstede yang mengatakan *“People are born into extended families or other ingroups which continue to protect them in exchange for loyalty”* (1997)

Setiap orang pasti terusik kalau ada yang melecehkan nama baik keluarganya dengan mengatakan hal yang tidak baik tentang keluarga, atau mencoreng nama baik keluarga. Dalam konteks extended family atribut berupa nama besar identitas kelompok, simbol dan lain sebagainya adalah ibarat nama baik tersebut. Begitu juga apabila ada yang masuk ke dalam kawasan rumah saya tanpa ijin, apalagi jika melakukan pengrusakan, hal ini di konteks extended family pada kasus mahasiswa Makassar adalah ketersinggungan yang terjadi apabila ada kelompok lain yang masuk melewati wilayah yang di klaim dikuasai oleh kelompoknya. Dan yang terakhir sosok pemimpin dalam budaya kolektivisme sangat dijunjung tinggi dan dihormati oleh karenanya ketersinggungan yang diakibatkan oleh pemukulan atau pelecehan kepada pemimpin mahasiswa makassar akan berdampak pada reaksi kelompok yang agresif dan menuntut balas dendam dari kelompoknya.

Bagi masyarakat kolektif, segala bentuk kekerasan yang dialami oleh satu atau lebih anggota kelompok yang dianggapnya sebagai keluarga (extended family-red) akan dirasakan sebagai kekerasan terhadap keseluruhan kelompok. Kekerasan itu tidak hanya dirasakan oleh anggota kelompok yang terlibat secara langsung pada saat konflik terjadi, tapi juga dirasakan oleh anggota kelompok yang tidak terlibat secara langsung pada saat konflik itu terjadi. “Luka” secara sosial yang dirasakan kolektif oleh para anggota kelompok dapat menjadi motivasi yang sangat kuat bagi para anggota kelompok dalam mempertahankan harga diri kelompok, sehingga tindak balas dendam yang kasar dianggap sebagai sesuatu yang harus dan wajar untuk dilakukan. Aksi balas dendam pun dilakukan ke identitas kelompok lawan, oleh karena itu isu yang mencuat adalah isu konflik

perbedaan identitas kelompok. Rasa kehilangan ini kemudian memicu terjadinya aksi balas dendam. “Darah dibalas dengan darah” adalah sesuatu hal yang dianggap acuan dalam melakukan aksi balas dendam, bahkan di beberapa masyarakat, dianggap sebagai persyaratan moral. Tindak penyerangan terhadap kelompok dianggap sebagai hal yang memalukan apabila tidak terbalaskan, dan pertumpahan darah anggota kelompok lain adalah hal yang dianggap dapat mengkompensasi hal tersebut. Tindak balas dendam dianggap sebagai tindakan yang patut dilakukan agar anggota kelompok dapat menegakkan kepala di lingkup sosialnya; tindak balas dendam dapat mengembalikan ego kelompok yang ternoda. Pada akhirnya, hal ini akan meng-escalasi konflik ke tingkat yang lebih tinggi, dan ingatan akan kekerasan yang dilestarikan akan menjadi pondasi bagi berkembangnya budaya kekerasan di suatu kelompok

Trigger yang berikutnya adalah Kebijakan stakeholder juga bisa bersifat memicu lahirnya konflik kekerasan antar kelompok. Dengan menggunakan kaca mata budaya kolektivisme, maka akan sangat mudah bagi kita untuk melihat kebijakan seperti apa yang dapat menjadi pemicu. Segala kebijakan yang bersifat merugikan kelompok dan/atau melukai salah satu dari kepentingan kolektif yaitu sistem nilai, heroes, tradisi, atau symbol maka akan berdampak pada perlawanan dari kelompok. Misalnya kebijakan yang bersifat kenaikan harga SPP. Hal ini akan mendorong gerakan kolektif untuk melawan kebijakan ini karena ini merugikan mahasiswa secara kolektif. Isu yang mencuat adalah mahasiswa vs birokrasi kampus. Tapi hal ini tidak bisa berdiri sendiri, protes mahasiswa terhadap kebijakan ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada faktor akar masalah berupa ketimpangan ekonomi. Ketika protes mahasiswa tidak berhasil dan seolah membentur tembok. Maka faktor berikutnya yang berperan adalah akar konflik yang lain yaitu ideologi masyarakat atau mahasiswa yang menggunakan opsi kekerasan untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian muncullah oknum yang mendesain konflik kekerasan antar kelompok apabila keinginannya tidak terpenuhi. Sebagaimana yang di sampaikan oleh wahyu hidayat (disampaikan pada

sesi SAT PAR tanggal 6 Februari 2018) “Konflik by desain dibuat sesuai dengan tujuan tertentu”. Dari sini berubahlah Isu SPP mahasiswa vs birokrasi kampus menjadi isu konflik kekerasan antar kelompok di Makassar.

Trigger yang berikutnya yang akan dibahas adalah adanya kecurangan atau tindakan-tindakan ketersinggungan dalam Pilkada, dinamika kemahasiswaan, dan birokrasi kampus. Seperti yang telah kita ketahui dalam budaya kolektivisme juga memiliki budaya power distance yang tinggi (Hofstede, 1997) oleh karena itu ketersinggungan yang terjadi kepada sosok yang di anggap *heroes* dalam satu kelompok identitas akan memicu gerakan kolektif dari kelompok tersebut. Sasarannya adalah pihak lawan politik. Isu yang mencuat kemudian adalah isu konflik pilkada. Tapi karena faktor akar masalah yaitu ideologi kekerasan yang digunakan sebagai jalan untuk penyelesaian masalah makanya ada kemudian oknum yang mendesain konflik agar terjadi kekacauan di lingkungan kampus. Isu yang mencuat kembali berubah yaitu dari isu konflik pilkada menjadi konflik antar identitas kelompok.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa budaya kolektivisme itu merupakan modal sosial dari seluruh fenomena konflik kekerasan antar kelompok mahasiswa di Kota Makassar. yang mana defenisi modal sosial dijelaskan oleh Putnam sebagai bagian-bagian yang dalam dalam organisasi sosial seperti jejaring, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi aksi dan kooperasi untuk keuntungan bersama. social capital bukan hanya suatu aksi kolektif tetapi lebih merujuk pada elemen-elemen tertentu yang mampu membawa masyarakat ke dalam aksi kolektif. Amartya Sen (2016) menilai identitas adalah modal sosial yang dimiliki oleh suatu komunitas. Modal sosial ini ibarat tanah, budaya kolektivisme menjadi dasar dari segala kerangka fenomena ini. Tentu saja tanah tidak ada yang negatif. Tanah selalu bersifat netral, oleh karena itu ada akar masalah yang menyebabkan timbulnya peristiwa-peristiwa konflik kekerasan antar kelompok.

Dari apa yang kita bahas maka setidaknya ada tiga akar masalah utama yang membuat terjadinya konflik kekerasan antar kelompok yaitu yang pertama adalah Adanya ideologi *ingroup* yang mengakar dan cenderung ekstrim yang mengakibatkan adanya Stereotip, prejudice, sekat-sekat, dan narasi kebencian permusuhan antara kelompok satu dan lainnya. Yang kedua adalah persoalan ketimpangan ekonomi yang melahirkan ketidakadilan sosial, dan yang terakhir adalah masih adanya ideology yang menghalalkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuannya.

4.3.3 Strategi Intervensi Sosial terhadap Konflik Identitas di Masyarakat Kolektif

Setelah memahami pola konflik kekerasan antar kelompok mahasiswa di Kota Makassar dengan menggunakan perspektif budaya kolektivisme maka akan memudahkan kita untuk untuk menguatkan strategi yang telah dirumuskan untuk mengintervensi konflik kekerasan antar kelompok mahasiswa ini.

Setelah melihat struktur masalahnya, pada dasarnya strategi yang harus dilakukan untuk mengintervensi konflik kekerasan antar kelompok mahasiswa di Kota Makassar dengan dua *grand strategy* yaitu membangun “kekitaan” dan “non violence approachment”. Hal ini dilakukan karena dua akar masalah yang mencuat adalah terkait Stereotip, prejudice, sekat-sekat, dan narasi kebencian permusuhan antara kelompok satu dan lainnya serta masih adanya ideology yang menghalalkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Visi strategi intervensi sosial yang di rumuskan sebagai tema strategi adalah makassar adalah rumah kita bersama. Tema ini membawa semangat kekitaan, dan juga tema ini juga sekaligus menjadi visi atau mimpi perubahan. Dari kalimat tersebut tersiratkan harapan bahwa Makassar menjadi rumah yang nyaman untuk semua pihak dan golongan. Hal ini juga baik karena menggunakan kata rumah yang bermakna wadah, kesadaran kolektif kita digeser dari Makassar sebagai salah satu identitas menjadi Makassar sebagai wadah yang menampung berbagai identitas.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Ichsan Malik (2017) bahwa langkah awal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik antar kelompok adalah bersama-sama menentukan “tujuan mulia” (superordiante goal).

Jadi sebenarnya ada yang disebut dengan de-kategorisasi. jadi dia sebut dengan dekategorisasi dengan cara membersihkan dulu strootip dan prasangka, itu juga yang selalu kita lakukan di dunia konflik. Hal ini dilakukan dengan strategi. Rekayasa ruang dan interaksi mahasiswa yang sistematis untuk membangun kekitaan, kebersamaan, dan persaudaraan. Menjejaringkan simpul-simpul kepemimpinan organisasi atau komunitas terkait, berjejaring dengan kelompok-kelompok rentan, mendorong keterlibatan simpul-simpul kepemimpinan dalam program conflict prevention dan peace building di tiap universitas dan organisasi daerah di Makassar dan melaksanakan project sosial bersama, aktivitas olahraga bersama, festival perdamaian, dan kegiatan positif lainnya yang dilakukan secara kolaboratif) Adanya interaksi antar kelompok ini diharapkan akan meruntuhkan prejudice sedikit demi sedikit .

Setelah bersih dari strootip dan prasangka baru di buat rekategorisasi, yaitu di bentuk identitas baru. Rekategorisasi inilah yang disebut dengan kekitaan. Kekitaan yang dimaksudkan disini adalah dengan membangun kesadaran bahwa Makassar hadir menjadi wadah yang menampung semua identitas baik Fakultas maupun antar daerah.

langkah ini sangat tepat dilakukan karena dengan melakukan *trace study leadership* kita akan mengenal dan terjaring dengan simpul-simpul kepemimpinan yang berpengaruh di setiap komunitas atau organisasi. Hal ini juga sesuai dengan perspektif kolektivisme yang melihat peran pemimpin atau tokoh yang dianggap ibarat *heroes* menjadi sangat signifikan.

Strategi *non violence approachment* dilakukan dengan cara mendorong dan memfasilitasi transformasi sistem pengkaderan lembaga atau organisasi mahasiswa kearah *non violence*.